

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM MEWUJUDKAN SWASEMBADA BERAS

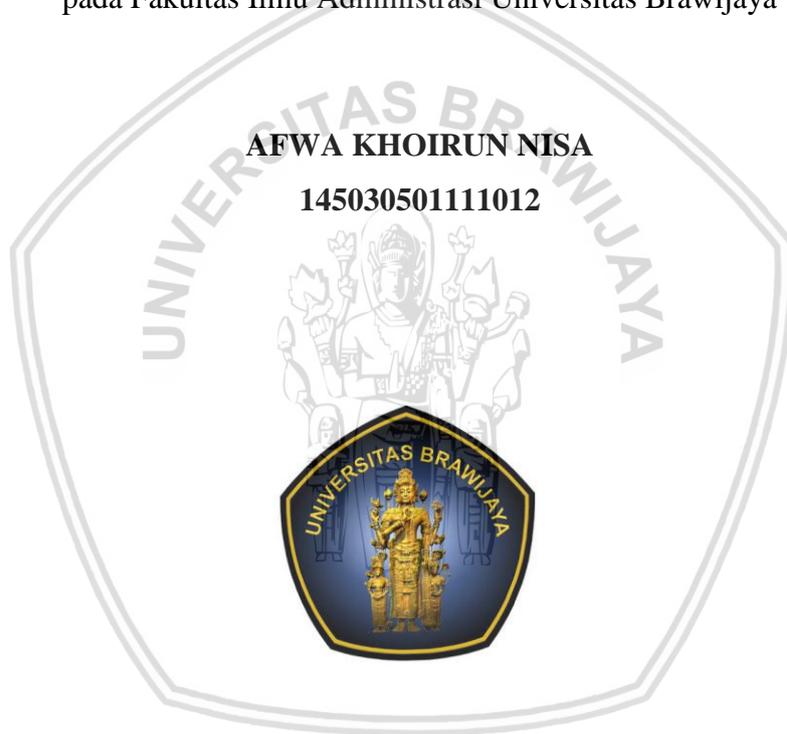
(Studi pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

AFWA KHOIRUN NISA

145030501111012



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
MALANG
2018**

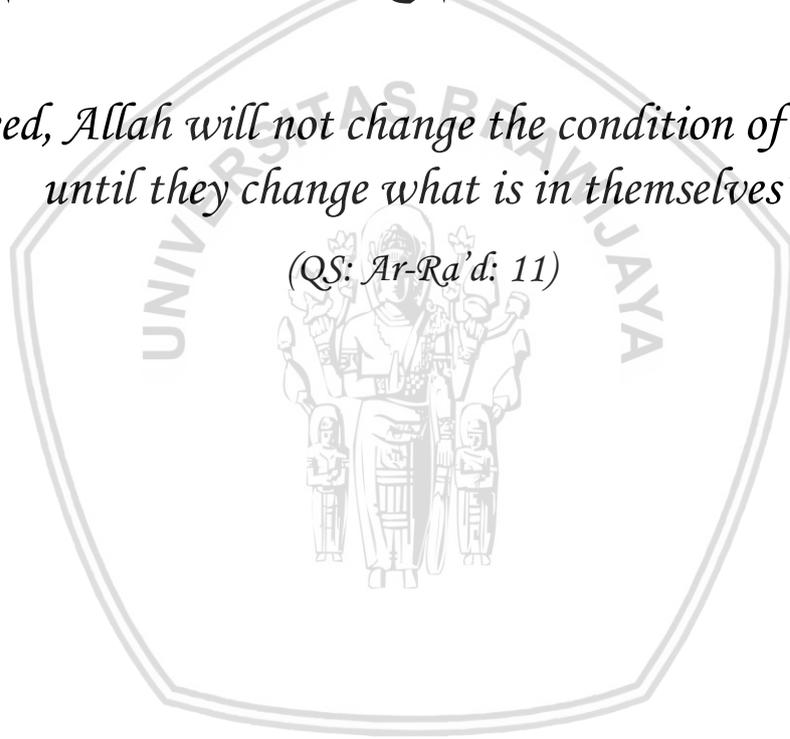


MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا يَفْعَلُ حَتَّىٰ يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Indeed, Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves”

(QS: Ar-Ra'd: 11)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Strategi Pemerintah Kabupaten Malang dalam
Mewujudkan Swasembada Beras (Studi Pada Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Malang)

Disusun Oleh : Afwa Khoirun Nisa

NIM : 145030501111012

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Minat Ilmu Administrasi Pemerintahan

Malang, 04 September 2018

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing



Dr. Sarwono, M.Si

NIP. 19570909 198403 1 002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

- Hari : Selasa
- Tanggal : 18 September 2018
- Waktu : 11.00 WIB
- Skripsi Atas Nama : Afwa Khoirun Nisa
- Judul : Strategi Pemerintah Kabupaten Malang dalam Mewujudkan Swasembada Beras (Studi pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang)



Dan dinyatakan LULUS
MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

Dr. Sarwono, M.Si
NIP. 19570909 198403 1 002

Oscar Radian Damar, S.AP., M.AP., Ph.D
NIP. 2011078705161001

Anggota

Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 04 September 2018



Nama : Afwa Khoirun Nisa
NIM : 145030501111012

RINGKASAN

Afwa Khoirun Nisa, 2018. **Strategi Pemerintah Kabupaten Malang dalam Mewujudkan Swasembada Beras (Studi Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang)**. Skripsi. Universitas Brawijaya. Dr. Sarwono, M.Si (134+xv)

Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Malang memiliki hak untuk mengatur daerahnya termasuk urusan mengendalikan pangan. Kabupaten Malang dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami kondisi surplus beras, dimana untuk mewujudkan swasembada beras ini, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang sebagai dinas yang menaungi sektor pertanian di Kabupaten Malang melaksanakan beberapa strategi. Namun, seiring dengan perkembangan kondisi di Kabupaten Malang, strategi-strategi ini di hadapkan dengan tantangan ke depan yang dapat mempengaruhi swasembada beras di Kabupaten Malang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis strategi, tantangan dan juga pengembangan strategi dari strategi pemerintah kabupaten malang dalam mewujudkan swasembada beras. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat di ketahui bahwa strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Malang untuk mewujudkan swasembada beras ini adalah (1) meningkatkan Indeks Pertanaman (2) meningkatkan Intensifikasi Lahan (3) melakukan pengawasan dan pembangunan jaringan irigasi (4) memberikan bantuan hibah alat mesin pertanian (5) mengadakan sosialisasi dan pelatihan penggunaan teknologi pertanian tepat guna (6) menciptakan inovasi bertanam tanpa media (7) melakukan kerjasama dengan *corporate farming* (8) melaksanakan program pemerintah. Tetapi dalam implementasinya, strategi-strategi yang di laksanakan ini masih terdapat kekurangan sehingga perlu adanya pengembangan strategi. Pengembangan strategi ini diperlukan untuk memperbaharui strategi-strategi yang kurang tepat sasaran, agar ke depannya dapat menentukan strategi yang lebih baik dan inovatif.

Kata kunci: Strategi, Tantangan, Swasembada Beras

SUMMARY

Afwa Khoirun Nisa, 2018. **Strategy of Malang District Government in Realizing Rice Self-Sufficiency (Studies in Food Crops, Horticulture and Plantation Agency of Malang Regency)**. Essay. Brawijaya University. 134 p +

xv

Regional autonomy is the right authority and obligation of autonomous regions to regulate and manage their own government affairs and the interests of the local community in the Indonesian Republican systems. The existence of regional autonomy, district government of Malang has right to regulate their area, include affairs to controlling food. Malang regency in the few years ago has experienced rice surplus, and to realize it, Food Crops, Horticulture and Plantation Service of Malang Regency as an agency that oversees the agricultural sectors in Malang regency carries out several strategies. However, along with the development of conditions in Malang regency, these strategies are faced with future threats that can affect rice self-sufficiency in Malang regency.

This research aims to find out, describe, and analyze the strategy, threats and strategy development of the strategies of the Malang district government in realizing rice self-sufficiency. This research uses descriptive research method with qualitative approach. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. data analysis method in this study is uses interactive analysis model Miles, Huberman, and Saldana which consists of data collection, data condensation, data presentation, and concluding drawing.

Based on the results of the study, it can be seen that the strategy carried out by Food Crops, Horticulture and Plantation Service of Malang Regency to realize rice self-sufficiency is (1) increase the cropping index (2) increase land intensification (3) supervise and develop irrigation networks (4) provide agricultural machinery aid grants (5) conduct socializations and training in the use appropriate agricultural technology (6) create innovations that grow without media (7) collaborate with corporate farming and (8) implement several government programs. But, in it's implementation, the strategies implemented are still lacking, so there are need for strategy development. The development of this strategy is needed to update strategies that aren't well targeted, so that in the future it can determine better and innovative strategies.

Keywords: Strategy, Threat, Rice Self-Sufficiency

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam Mewujudkan Swasembada Beras (Studi Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik pada Prodi Ilmu Administrasi Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Dr. Luqman Hakim, M.Sc, selaku Ketua Minat Administrasi Pemerintahan.
4. Dr. Sarwono, M.Si, selaku Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan baik secara teknis, teoritis maupun moril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak Ajunuddin, selaku Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang, Bapak Slamet Budi Samsul selaku Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, Bapak Rony selaku Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, Bapak Suwaji selaku Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alat Mesin Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Bapak Heri Saputra, Kepala Seksi Distribusi dan Akses Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Bapak Jusuf. Bapak Suprpto selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Bumi Makmur, Desa Curungrejo, Kecamatan Kepanjen, dan Ibu Wiji Rahayu selaku sekretaris Gabungan Kelompok Tani Bumi Makmur dan juga Ketua Kelompok Wanita Tani Cinde Wilis Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen serta Bapak Khoiruddin selaku petani pemilik lahan di desa Asrikaton yang telah memberikan informasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
7. Kedua orangtua penulis yang senantiasa memberikan doa serta dukungan moral dan materi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

8. Saudara-saudara penulis, Arina Sabila dan Mbak Dwi Asrina yang selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku “*CLIQUE*” Yessy Agustina, Novita Ayu Permatasari, Fahrina Ni'matu Zahro, Nadine Kezsiavelya Onny Amirsyah dan Wahyu Yatim Miranda yang tidak pernah lupa mendoakan dan menyemangati penulis.
10. Teman-teman “*Ayam-Ayam*” Mella Amalia Nusa, Rizki Idhania, Nurul Apriyanti dan Dwi Ambar Rukmi Pangesti yang selalu membantu, menyemangati dan juga mendoakan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman Administrasi Pemerintahan 2014 yang selalu mendukung dan menyemangati penulis di dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Senior-senior Administrasi Pemerintahan 2011 dan 2013, Mas Rizal dan Mas Yudho yang selalu mendengarkan dan juga membantu masalah-masalah penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 04 September 2018

Penulis



DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Kontribusi Penelitian	9
1) Kontribusi Akademis	9
2) Kontribusi Praktis	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Pengertian Pemerintah Daerah	15
C. Otonomi Daerah	17
1) Pengertian Otonomi Daerah	17
2) Prinsip Otonomi Daerah	18
D. Strategi	19
1) Pengertian Strategi	19
2) Jenis Strategi	20
3) Peranan Strategi dalam Organisasi	22
4) Pengertian Manajemen Strategi Sektor Publik	23
E. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019	25
F. Revolusi Hijau	35
G. Swasembada Beras	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40

B. Fokus Penelitian	41
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	43
1) Data Primer	43
2) Data Sekunder	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
1) Wawancara	45
2) Observasi	46
3) Dokumentasi	46
F. Instrumen Penelitian	47
1) Peneliti	47
2) Pedoman Wawancara	47
3) Perangkat Penunjang	47
G. Metode Analisis Data	48
1) Pengumpulan Data	49
2) Reduksi Data	49
3) Penyajian Data	49
4) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi	50
H. Keabsahan Data	50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Situs Penelitian	52
1) Gambaran Umum Kabupaten Malang	52
a) Kondisi Geografi dan Topografi Kabupaten Malang	54
b) Kondisi Geologi Kabupaten Malang	56
c) Kondisi Hidrologi	57
d) Kondisi Klimatologi	57
e) Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Malang	58
f) Kondisi Pertanian di Kabupaten Malang	59
2) Gambaran Umum Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang	61
a) Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang	63
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	65
1) Strategi Pemerintah Kabupaten Malang dalam Mewujudkan Swasembada Beras	65
a) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan	67
b) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian	70
c) Penguatan kelembagaan petani	77
2) Menghadapi Tantangan ke Depan	81
a) Menghadapi luas lahan pertanian yang berkurang	81
b) Menghadapi Sumber Daya Manusia yang mulai meninggalkan sektor pertanian	87
c) Menghadapi alur distribusi beras yang panjang	91

3) Pengembangan strategi yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam menghadapi tantangan ke depan.....	95
a) Menentukan pengembangan strategi untuk menghadapi tantangan ke depan	95
C. Analisis Data	96
1) Strategi Pemerintah Kabupaten Malang dalam Mewujudkan Swasembada Beras	96
a) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan	96
b) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian	99
c) Penguatan kelembagaan petani	101
2) Menghadapi Tantangan ke depan	103
a) Menghadapi luas lahan pertanian yang berkurang	103
b) Menghadapi Sumber Daya Manusia yang mulai meninggalkan sektor pertanian.....	106
c) Menghadapi alur distribusi beras yang panjang	108
3) Pengembangan strategi yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam menghadapi tantangan ke depan.....	110
a) Menentukan pengembangan strategi untuk menghadapi tantangan ke depan	110
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN	128



DAFTAR TABEL

No.	Tabel	Hal
1.1	Klasifikasi Jenis Lahan Pertanian di Kabupaten Malang.....	6
1.2	Kebutuhan dan Ketersediaan Beras di Kabupaten Malang.....	7
2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	12
4.1	Klasifikasi Tenaga Kerja Menurut Sektor Tahun 2016	88



DAFTAR GAMBAR

No.	Gambar	Hal
2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Tahun 2015-2019	25
3.1	Model analisis data interaktif	49
4.1	Wilayah Kabupaten Malang	52
4.2	Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang	62
4.3	Penggunaan traktor oleh salah satu petani	75
4.4	Padi Paralon	86
4.5	Padi Paralon	105



DAFTAR GRAFIK

No.	Grafik	Hal
4.1	Presentase Kontribusi Sub Sektor Pertanian	4
4.2	Pencapaian Swasembada Beras di Kabupaten Malang Tahun 2011 hingga 2017	66
4.3	Penurunan Luas Lahan Sawah di Kabupaten Malang Tahun 2015 hingga 2017	83



DAFTAR BAGAN

No.	Bagan	Hal
4.1	Contoh Ilustrasi Alur Distribusi Beras di Kabupaten Malang	92
4.2	Gambaran Pengembangan Strategi	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai pada 1 Januari 2001 yang saat itu berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Adisasmita, agar daerah dapat mengikuti perkembangan kemajuan dunia, maka diperlukan adanya paradigma dalam manajemen pemerintahan daerah, diantaranya penanganan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam perencanaan, kebijakan, dan pelaksanaan (implementasi) berbagai tindakan di sektor publik dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Adisasmita, 2011:47)

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antarsusunan pemerintahan dan pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilakukan secara

adil dan selaras (Domai, 2011:1). Dalam menjalankan tugas/fungsi Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Otonom harus melaksanakan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien, pembangunan daerah yang merata ke seluruh bagian wilayah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik) secara tepat, cepat, murah, dan bermutu (Adisasmita, 2011:35).

Sedangkan dalam pelaksanaannya, otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi yang seluas-luasnya berarti daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya di luar urusan pemerintah pusat, otonomi nyata artinya untuk menangani urusan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah, sedangkan untuk arti otonomi yang bertanggung jawab mengandung arti bahwa otonomi yang diselenggarakan harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan didalam otonomi daerah terdiri dari Pemerintahan Daerah dimana menurut Domai (2011:6) Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah disini adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah terdapat klasifikasi mengenai pembagian urusan pemerintahan, dimana penyelenggaraan urusan-urusan yang telah dilimpahkan kepada pemerintahan daerah ini, terbagi menjadi beberapa klasifikasi urusan pemerintahan. Klasifikasi Urusan Pemerintahan ini diantaranya:

1. Urusan Pemerintahan Absolut. Dimana urusan ini merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah Pusat.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren, merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dalam urusan pemerintahan konkuren ini terbagi atas:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang didalamnya terbagi lagi menjadi 2 yakni: urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
 - b. Urusan Pemerintahan Pilihan
3. Urusan Pemerintahan Umum, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Salah satu urusan konkuren yang termasuk kedalam pemerintahan wajib dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah mengenai Pangan. Dimana Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan

bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam memenuhi pangan tersebut, pemerintah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah, maka secara langsung memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Adanya kebijakan otonomi daerah, potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah, keragaman budaya terkait pangan serta adanya lembaga pemerintahan daerah yang mendukung pengembangan daerah merupakan kekuatan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan salah satu poin dari agenda prioritas Presiden saat ini, yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Dimana poin ini menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. (Pedoman Umum Subsidi Pangan (Rastra)).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah

maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Karena pangan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, maka seluruh kebijakan yang telah dibentuk mengenai Pangan harus dilaksanakan bagi semua pemerintahan daerah.

Salah satu hasil tanaman pangan yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat di Indonesia adalah beras. Dalam pembangunan pertanian, beras merupakan komoditas yang memegang posisi strategis. Beras dapat disebut komoditas politik karena menguasai hajat hidup rakyat Indonesia. Lebih dari 90% penduduk Indonesia menjadikan beras sebagai makanan pokoknya (Firdaus,dkk 2008:1). Salah satu kebijakan mengenai ketahanan pangan adalah adanya program mengenai swasembada beras. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, swasembada adalah usaha untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Maka dapat dipahami bahwa swasembada beras merupakan usaha untuk mencukupi kebutuhan beras bagi diri sendiri.

Adanya program swasembada beras di pemerintah daerah ini, merupakan salah satu dari perwujudan otonomi daerah. Dimana diketahui bahwa dengan adanya otonomi daerah ini, Pemerintahan Daerah memiliki hak untuk mengatur daerahnya, baik dari pelaksanaan kebijakan yang dibuat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat termasuk dalam mengendalikan pangan di daerah masing-masing. Salah satu Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan kebijakan mengenai Pangan adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

Kabupaten Malang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah terbesar kedua setelah Banyuwangi. Diketahui luas wilayah Kabupaten Malang seluas 297.705 Ha (Kabupaten Malang dalam Angka, 2017), dimana seluas 222.274 Ha atau sebesar 74,66% ini adalah lahan pertanian, tabel dibawah menunjukkan klasifikasi lahan pertanian di Kabupaten Malang.

Tabel 1.1 Klasifikasi Jenis Lahan Pertanian di Kabupaten Malang tahun 2017

No.	Areal	Luas (dalam Ha)	%
1.	Lahan Sawah	45.888	14,31%
2.	Ladang/Kebun	113.664	35,45%
3.	Areal Perkebunan	22.643	7,06%
4.	Hutan	40.079	12,50%

sumber: Kabupaten Malang dalam Angka, 2017

Berdasarkan tabel diatas, lahan sawah seluas 45.888 Ha ini terbagi menjadi 2 jenis yakni: irigasi dan tadah hujan yang tersebar di 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Meskipun Kabupaten Malang belum termasuk kabupaten yang berpengaruh dalam menghasilkan beras terbesar di Jawa Timur dibanding dengan wilayah lainnya seperti Kabupaten Jember, Lamongan, Banyuwangi, Bojonegoro, dan Ngawi (sumber: madiunpos.com) tetapi Kabupaten Malang dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan swasembada beras. Hal ini dibuktikan dengan kondisi surplus beras di Kabupaten Malang yang terjadi mulai tahun 2011 dan dipaparkan lebih jelas dalam tabel dibawah ini.

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kebutuhan Beras	222.780	168.737	206.235	228.440	230.110	233.165	234.615
2.	Ketersediaan Beras	287.586	207.322	263.633	273.377	301.822	319.247	309.806
	Surplus/Minus (Ton)	64.806	38.585	57.399	44.937	71.712	86.082	75.191

Tabel 1.2 Kebutuhan dan Ketersediaan Beras di Kabupaten Malang

sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Malang, 2018

Berdasarkan tabel di atas, surplus beras di Kabupaten Malang terjadi mulai tahun 2011, yang mana angka pencapaian surplus beras paling besar terjadi pada tahun 2016. Menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang mengatakan bahwa pihaknya optimis, Kabupaten Malang sebagai penyangga kebutuhan pangan Malang Raya, kondisi tersebut dicapai karena petani mampu memberikan produktivitas hingga 7,03 hingga 8 ton per Ha dengan IP 2,5 (sumber: cendananews.com). Pernyataan ini juga di dukung oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang mengatakan bahwa:

“Perhatian Pemerintah melalui Kementerian Pertanian kepada petani sudah dibuktikan dengan adanya distribusi 280.000 unit alat dan mesin pertanian, dibangunnya 3.000.000 jaringan irigasi tersier, dan 3.000 embung untuk seluruh Indonesia.” (sumber: surabaya.tribunnews.com)

Dengan adanya bantuan dari Pemerintah seperti yang telah dikatakan oleh Kepala Balitbangtan diatas, maka upaya Pemerintah Kabupaten Malang dalam

mewujudkan program swasembada beras ini dapat dijalankan. Tetapi, disamping itu pemerintah Kabupaten Malang dihadapkan dengan beberapa tantangan dalam terwujudnya program swasembada beras ini seperti, adanya jumlah pertambahan penduduk sehingga diperlukan adanya pembangunan kawasan perumahan dan tempat pariwisata dan berkurangnya Sumber Daya Manusia yang bekerja di sektor Pertanian.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai tantangan yang akan dihadapi Pemerintah Kabupaten Malang dalam melaksanakan swasembada beras kedepannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja strategi Pemerintah Kabupaten Malang dalam mewujudkan swasembada beras?
2. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Malang menghadapi tantangan ke depan untuk mewujudkan swasembada beras?
3. Bagaimana pengembangan strategi yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam menghadapi tantangan ke depan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis hal-hal yang perlu di persiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam mewujudkan swasembada beras
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis sikap Pemerintah Kabupaten Malang dalam menghadapi kendala yang terjadi dalam mewujudkan swasembada beras.
3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk menghadapi tantangan ke depan.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan nilai (*value*) baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis
 - a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperbanyak khazanah Ilmu Pengetahuan dalam dunia akademis khususnya Ilmu Administrasi Pemerintahan. Selain itu dapat mempertajam dan mengembangkan teori-teori yang ada dalam dunia akademis.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana untuk memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman di bidang penelitian terutama mengenai upaya Kabupaten Malang dalam mencapai swasembada beras.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Instansi

Dapat memberikan bahan informasi atau masukan kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang sebagai bahan kajian serta sumbangan dalam pemikiran sehingga dapat melaksanakan tujuan yang akan dicapai.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya petani dalam menyikapi dan merespon upaya pemerintah Kabupaten Malang dalam mewujudkan swsembada beras.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait isi penulisan, yang disampaikan pokok-pokok bahasan yang ada pada setiap bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti, perumusan masalah, tujuan penelitian yang akan dicapai melalui penelitian, kontribusi penelitian dan hasil penelitian, serta sistematika penulisan untuk penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan beberapa pendapat para ilmuwan serta teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian sebagai landasan atau arahan yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang akan digunakan dalam penulisan yang meliputi jenis dan sumber data penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi penyajian data, analisis data dan hasil interpretasi analisis data yang diperoleh selama penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran.

Kesimpulan berasal dari uraian bab-bab sebelumnya dan saran berkaitan dengan hal-hal yang seharusnya dilakukan berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Dari penelitian terdahulu, penulis mengangkat beberapa penelitian tersebut sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Rahayu (2016) melakukan penelitian tentang analisis pencapaian program swasembada beras pada tahun 2017 di Indonesia. Pencapaian program swasembada dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa analisis pencapaian program swasembada beras ini faktor yang dapat mempengaruhi produksi beras yang diinterpretasikan dari luas areal panen dan produktivitasnya, serta terjadi peningkatan proyeksi produksi dan konsumsi beras dalam waktu tiga tahun (2015-2017).

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Penulis, Tahun	Metode Penelitian	Hasil
1.	Strategi Peningkatan Swasembada Beras Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, Andian Puji Rumpoko, 2013	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya strategi peningkatan swasembada beras di Jawa Timur ini merupakan tolak ukur untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok

			penduduk Jawa Timur, serta mengestimasi dengan regresi berganda data panel untuk melihat pengaruh jumlah produksi padi, jumlah konsumsi padi, jumlah penduduk dan luas lahan panen padi terhadap rasio ketersediaan pangan beras di Jawa Timur.
2.	Proyeksi Produksi Beras dan Strategi Mewujudkan Swasembada Beras di Kabupaten Ketapang, Hendri Sibuea et.al, Jurnal Social Economic of Agriculture, Volume 3, Nomor 1, April 2014	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa skenario yang ideal untuk mencapai swasembada beras adalah dengan penggabungan antara peningkatan produksi dengan proyeksi konsumsi. Sedangkan perumusan strategi yang dilakukan dengan metode SWOT sehingga diketahui bahwa strategi yang dapat digunakan adalah strategi yang memfokuskan pada kekuatan (strategi progresif) yang dimiliki Kabupaten Ketapang.
3.	Analisis Pencapaian Program Swasembada Beras Pada Tahun 2017 di Indonesia, Rahayu, 2016	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam analisis pencapaian program swasembada beras ini faktor yang dapat mempengaruhi produksi beras yang diinterpretasikan dari luas areal panen dan produktivitasnya, serta terjadi peningkatan proyeksi produksi dan konsumsi beras dalam waktu tiga tahun (2015-2017) sebesar 1,71% dan

			0,55%, sehingga swasembada beras di tahun 2017 dapat tercapai, dilihat dari tingkat konsumsi yang lebih kecil daripada tingkat produksi. Tetapi, disamping itu hasil produksi masih belum bisa mencapai target dari Kementerian Pertanian, sehingga perlu adanya kebijakan untuk meningkatkan produksi padi domestik.
--	--	--	---

Tabel diatas menunjukkan beberapa hasil penelitian yang memiliki tema serupa dengan penelitian ini. Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah dari metode penelitian, dimana para peneliti terdahulu dominan menggunakan deskriptif kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena peneliti disini lebih cenderung fokus kepada hal-hal yang perlu dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang khususnya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dalam mencapai swasembada beras di Kabupaten Malang. Untuk persamaannya terletak pada tema yang di teliti yakni tentang swasembada beras.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya fokus kepada strategi Pemerintah Kabupaten Malang saja tetapi juga pada aspek tantangan ke depan dalam mencapai swasembada beras. Sehingga nantinya di dalam penelitian ini tidak hanya akan membahas langkah yang perlu dipersiapkan dalam

melaksanakan strategi, tetapi juga mengetahui langkah seperti apa yang akan dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang dalam menghadapi tantangan ke depan.

B. Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Domai (2011:6) Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Andriansyah (2015:18) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan daerah otonomi oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah.

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus melaksanakan fungsi Otonomi Daerah seperti yang dijelaskan Adisasmita yakni: penyelenggaraan pemerintah daerah secara efektif dan efisien, pembangunan daerah yang merata ke seluruh bagian wilayah dan memberikan

repository.ub.ac.id

elayanan kepada masyarakat (publik) secara tepat, cepat, murah dan bermutu (Adisasmita, 2011:35). Kepala Daerah dan DPRD sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah diberi mandat oleh rakyat karena pada hakikatnya Kepala Daerah dan DPRD dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Sehingga Kepala Daerah dan DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar yang memiliki fungsi berbeda. DPRD memiliki fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah.

Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, peran pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 adalah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masing-masing dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, dilakukan dengan:

- a. Memberikan informasi dan pendidikan ketahanan pangan
- b. Meningkatkan motivasi masyarakat
- c. Membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan
- d. Meningkatkan kemandirian ketahanan pangan

Dari uraian mengenai pengertian pemerintahan daerah diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah merupakan unsur yang terdiri dari

kepala daerah dan DPRD yang saling bekerjasama dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah di daerah otonom yang didauletnya.

C. Otonomi Daerah

1. Pengertian

Secara etimologi, Otonomi daerah berasal dari 2 kata yaitu otonom dan daerah. Kata otonom dalam bahasa Yunani berasal dari kata *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti aturan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Adisasmita (2011:2) otonomi daerah diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada daerah otonom (dalam hal ini adalah kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya sesuai dengan aspirasi daerah setempat dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan otonomi

daerah secara luas dan bertanggung jawab dituntut diterapkannya manajemen pemerintah daerah yang efektif dan efisien.

2. Prinsip Otonomi Daerah

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu dengan Perangkat Daerah. Dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, diantaranya:

- a. Prinsip Otonomi Seluas-luasnya, artinya daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
- b. Prinsip Otonomi Nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
- c. Prinsip Otonomi yang Bertanggung Jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan

dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. (Domai, 2011:2)

Dengan adanya sistem otonomi ini, dapat memudahkan pembangunan kekuatan pangan di tingkat daerah. Kebijakan ketahanan pangan nasional menjadi payung kebijakan ketahanan pangan daerah. Dengan demikian, pembangunan pangan yang dilakukan antar daerah terintegrasi dan sejalan dengan kebijakan di tingkat nasional. Sehingga daerah dapat menjalankan kebijakan ketahanan pangan sesuai dengan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Otonomi Daerah adalah pemberian hak, wewenang dan juga kewajiban yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk menjalankan sistem otonomi daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah.

D. Strategi

1. Pengertian

Kata strategi pada dasarnya berasal dari Bahasa Yunani, yaitu dari kata *strategos* yang artinya komandan militer yang digunakan pada zaman demokrasi Athena.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:964), strategi memiliki beberapa pengertian diantaranya:

- a. Ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai
- b. Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan
- c. Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus
- d. Tempat yang baik menurut siasat perang

Menurut Kusdi (2009:87) berpendapat bahwa strategi adalah penetapan rencana dalam berbagai tujuan dan sarana jangka Panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai berbagai sarana yang diperlukan.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian strategi diatas, dapat disimpulkan strategi merupakan rencana yang terarah dan terintegrasi sehingga tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai dengan tepat.

2. Jenis Strategi

Jenis strategi yang diungkapkan Kotleen dalam (Salusu, 1996:104-105), strategi dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

- a. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)
Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif stratejik yang baru. Pembatasan diperlukan untuk melihat apa yang dilakukan dan untuk siapa.
- b. *Strategy Program* (Program Strategi)
Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program tertentu. Melihat seperti apa kira-kira dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan setelah itu dilihat pula apa dampaknya bagi sasaran organisasi.

- c. *Resource Report Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)
Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya yang diperlukan berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.
- d. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan)
Fokus dari strategi ini adalah untuk mengembangkan kemampuan organisasi sehingga dapat melaksanakan inisiatif-inisiatif strategik.

Sedangkan menurut Adisasmita (2011:53) terdapat strategi 5 C yang merupakan strategi kombinasi yang *reliable* (terjamin secara konseptual) *acceptable* (dapat diterima secara luas), dan *implementable* (dapat diimplementasikan) dalam melaksanakan kegiatan kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kelima strategi ini adalah:

- a. *Core Strategy* (Strategi Inti)

Adalah strategi yang memfokuskan pada tanggung jawab apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tanggung jawab apa yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sektor publik harus jelas.

- b. *Consequences Strategy* (Strategi Konsekuensi)

Adalah strategi yang memperhitungkan terhadap konsekuensi (akibat atau dampak) yang ditimbulkan oleh pengembangan berbagai kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial yang bersifat kompetitif, persaingan yang tidak sehat dan dapat mengakibatkan konsekuensi negatif.

Sehingga hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan upaya atau langkah-langkah pencegahan secara terarah dan konstruktif.

c. *Customer Strategy* (Strategi Pelanggan)

Adalah strategi yang mengutamakan kepentingan pelanggan, yaitu masyarakat yang menjadi pengguna jasa pelayanan publik (umum). Dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki tugas dalam menyediakan pelayanan publik secara cukup, cepat, murah, dan berkualitas.

d. *Control Strategy* (Strategi Pengawasan)

Adalah strategi yang ditujukan untuk melakukan pengawasan, utamanya terhadap terselenggaranya pemberdayaan meliputi pemberdayaan dalam pemanfaatan sumberdaya (material, dana, prasarana dan sarana), pemberdayaan staf aparat pemerintah daerah, dan pemberdayaan masyarakat.

Dari beberapa jenis strategi menurut para ahli diatas, sejatinya strategi dapat diterapkan dengan melihat kondisi dan kemampuan suatu organisasi, yang selaras dengan tujuan, visi, dan misi dari organisasi tersebut. Sehingga strategi yang dicapai akan sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut.

3. Peranan Strategi dalam Organisasi

Strategi memiliki peran yang cukup penting bagi suatu organisasi yang akan mencapai tujuan agar lebih efektif dan efisien. Strategi dapat membantu agar organisasi dapat beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi dan mempengaruhi aktifitas organisasi sehingga dapat mengendalikan tujuan yang akan dicapai. David (2002:15) menjelaskan manfaat dari penetapan strategi yang digunakan pada organisasi, antara lain:

- a. Aktivitas formulasi strategi akan mempertinggi kemampuan organisasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
- b. Membantu organisasi membuat strategi yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, logis dan rasional pada pilihan strategi
- c. Keterlibatan karyawan dalam formulasi strategi memperbaiki pengertian mereka atas penghargaan produktivitas di dalam setiap perencanaan strategi dan dengan demikian dapat mempertinggi motivasi kerja karyawan
- d. Strategi memungkinkan untuk identifikasi, penentuan prioritas dan eksploitasi peluang. Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk peluang yang telah teridentifikasi serta memungkinkan alokasi sumber daya dan waktu yang lebih sedikit untuk mengoreksi keputusan yang salah atau tidak terencana.

Peran strategi bagi organisasi, khususnya bagi organisasi publik sangat menentukan arah kerja yang akan dilaksanakan untuk ke depannya. Sehingga tujuan dari adanya organisasi publik tersebut dibentuk akan terwujud sesuai dengan visi misi. Dengan didukung dari produktivitas para pegawainya.

4. Pengertian Manajemen Strategi Sektor Publik

Manajemen strategi merujuk pada proses manajerial untuk membentuk visi strategi, penyusunan objektif, penciptaan strategi, mewujudkan dan melaksanakan strategi, kemudian sepanjang waktu melakukan penyesuaian dan koreksi terhadap visi. Siagian dalam (Bawono, 2010) mendefinisikan manajemen strategi sebagai berikut:

“serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut”

Menurut Bawono, manajemen strategik tidak hanya digunakan oleh sektor swasta, tetapi juga dapat digunakan pada sektor publik. Dimana penerapan pada sektor publik tidak menekankan tujuan organisasi dalam mencari keuntungan/laba, tetapi lebih menekankan pada pemberian pelayanan kepada masyarakat. Menurut Anthony dan Young dalam (Bawono, 2010) penekanan organisasi sektor publik dapat diklasifikasikan ke dalam 7 hal, diantaranya:

- a. Tidak bermotif mencari keuntungan
- b. Adanya pertimbangan khusus dalam pembebanan pajak
- c. Ada kecenderungan berorientasi semata-mata pada pelayanan
- d. Banyak menghadapi kendala yang besar pada tujuan dan strategi
- e. Kurang banyak menggantungkan diri pada kliennya untuk mendapatkan bantuan keuangan
- f. Dominasi profesional
- g. Pengaruh politik biasanya memainkan peranan yang sangat penting

E. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
<p>Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani"</p>	1. Mewujudkan kedaulatan pangan	1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan	1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula 2. Peningkatan diversifikasi pangan
	2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan	2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian	3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor
	3. Mewujudkan kesejahteraan petani	3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi	4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
	4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi	4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani 5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional	5. Peningkatan pendapatan keluarga petani 6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

Gambar 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Tahun 2015-2019

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Sasaran yang ingin di capai dalam periode 2015-2019 adalah:

1. Swasembada padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula
2. Peningkatan diversifikasi pangan

3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan strategi utama penguatan pembangunan pertanian untuk kedaulatan pangan (P3KP) di antaranya:

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan
2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian
3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit
4. Penguatan kelembagaan petani
5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian
6. Pengembangan dan penguatan bio industri dan bioenergy
7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian

Dari ke 7 sasaran utama diatas, peneliti mengambil 3 poin untuk membatasi penelitian agar tidak terlalu melebar, ke tiga poin tersebut adalah:

1. Peningkatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Lahan

Dalam rangka peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan di lakukan rencana aksi seperti:

- a. Audit Lahan

Membangun database baik tabular maupun spasial yang lengkap dan akurat melalui inventarisasi sumber daya lahan pertanian dengan pengembangan sistem informasi geografi (SIG) atau pemetaan tanah sistematis dan tematik yang terintegrasi dengan data identitas petani.

- b. Mengimplementasikan secara efektif Undang-Undang No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Undang-Undang PLP2B dan Peraturan Pemerintah pendukungnya merupakan perangkat hukum untuk melindungi lahan pangan produktif dan menekan laju konversi lahan pertanian. Selain itu diharapkan mendapat dukungan kesesuaian dengan RTRW Kabupaten.
- c. Melakukan upaya-upaya perlindungan, pelestarian dan perluasan areal pertanian terutama di luar Jawa sebagai kompensasi alih fungsi lahan terutama di Jawa melalui:
 - i. Upaya pengendalian alih fungsi lahan melalui penyusunan dan penerapan perangkat peraturan perundangan,
 - ii. Pencetakan sawah baru seluas 1 juta hektar diluar pulau jawa terutama dengan memanfaatkan lahan terlantar, lahan marjinal, lahan di kawasan

transmigrasi, bekas lahan pertambangan, serta memanfaatkan tumpangsari,

- iii. Melestarikan dan/atau mempertahankan kesuburan lahanlahan produktif dan intensif,
- iv. Melakukan upaya rehabilitasi dan konservasi lahan terutama pada lahan pertanian daerah aliran sungai (das) hulu,
- v. Melakukan upaya reklamasi dan optimasi lahan pada lahanlahan marginal dan sementara tidak diusahakan atau bernilai Indeks Pertanaman (IP) rendah.

Terkait dengan rencana pendistribusian lahan 9 juta hektar kepada petani, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menyiapkan program Reforma Agraria, yang terdiri dari : Redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar dan berasal dari hasil legalisasi asset yang subjeknya memenuhi syarat 4,5 juta hektar. Lahan yang menjadi prioritas untuk dikonversi menjadi lahan pertanian adalah (1) hutan produksi tetap, (2) hutan produksi terbatas, dan (3) hutan lindung. Sementara, hutan produksi dapat dikonversi akan menjadi prioritas berikutnya, yaitu untuk budidaya, industri, pemukiman dan peruntukan lainnya.

- d. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar yang meliputi lahan pertanian yang selama ini tidak dibudidayakan (lahan tidur atau bongkor), dan kawasan hutan yang telah

dilepas untuk keperluan pertanian tetapi belum dimanfaatkan, atau lahan pertanian yang masih dalam kawasan hutan (wewenang sektor kehutanan).

- e. Membantu petani dalam sertifikasi lahan, mendorong pengelolaan dan konsolidasi lahan, advokasi petani dalam pengelolaan warisan agar tidak terbagi menjadi lahan sempit dalam upaya mengurangi segmentasi lahan, dan/atau menjadi lahan non-pertanian. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian dan segmentasi lahan serta mendorong pengembangan usahatani berskala ekonomi.
- f. Mempertahankan kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi lahan marginal dengan upaya-upaya yang akan dilakukan diantaranya:
 - i. Melakukan perbaikan dan pencegahan kerusakan tanah, dengan menerapkan teknologi konservasi tanah dan air untuk mengurangi erosi dan mencegah longsor serta meningkatkan produktivitas lahan.
 - ii. Melakukan penanaman tanaman pohon (buah-buahan) dan perkebunan) di daerah kawasan aliran sungai, dan turut serta dalam sistem komunikasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya mengurangi pembabatan dan kerusakan hutan dan rangka memperbaiki dan

meningkatkan kualitas sumberdaya lahan dan air serta lingkungan di kawasan hulu.

iii. Mendorong petani untuk menggunakan sistem pemupukan berimbang yang diintegrasikan dengan pupuk organik, dan menerapkan praktek budidaya pertanian yang tepat guna dan ramah lingkungan.

g. Optimalisasi sumberdaya air yang eksisting dan pengembangan sumber air alternatif baik air tanah maupun permukaan, melalui upaya:

- i. Rehabilitasi, optimalisasi, dan peningkatan/pengembangan jaringan irigasi baik tingkat utama maupun usahatani.
- ii. Upaya peningkatan efisiensi penyaluran dan pemanfaatan air.
- iii. Perbaikan struktur fisik tanah dan penambahan bahan organik, serta penerapan berbagai teknologi koservasi tanah dan air.
- iv. Pengembangan dan memantapkan kelembagaan petani pemakai air, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, kesadaran, kepedulian dan partisipasi petani.

2. Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Pertanian

Dalam rangka peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan oleh petani di areal usahatani seperti jalan usahatani, jalan produksi, jaringan irigasi tingkat (JITUT), jaringan irigasi desa (JIDES), jaringan irigasi tersier dan kuarter. Disamping itu juga diperlukan infrastruktur di luar areal usahatani seperti jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, jalan kabupaten, jalan propinsi, jalan negara, pelabuhan, bandara, sarana transportasi, jaringan listrik, jaringan komunikasi dan lain sebagainya.
- b. Pembangunan infrastruktur tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pertanian sendiri, tapi juga yang akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota maupun oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya koordinasi yang baik agar tepat lokasi dan sesuai kebutuhan.
- c. Peningkatan sarana pertanian meliputi bantuan sarana pembuatan pupuk organik, biogas, sarana budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan sarana pemasaran.
- d. Penguatan kelembagaan brigade tanam.
- e. Penguatan peran kelompok tani dalam pengelolaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).

Terkait dengan peningkatan layanan irigasi, maka dilakukan upaya-upaya seperti:

- i. Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang mempertimbangkan jaminan ketersediaan air dan memperhatikan kesiapan petani penggarap baik secara teknis maupun kultural serta membangun daerah irigasi baru khususnya di luar Pulau Jawa.
- ii. Rehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi rusak pada daerah utama penghasil pangan dan mendorong keandalan jaringan irigasi kewenangan daerah melalui penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun bentuk pengelolaan dari pemerintah pusat.
- iii. Optimalisasi layanan jaringan irigasi melalui operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- iv. Pembentukan manajer irigasi sebagai pengelola pada satuan daerah irigasi.
- v. Peningkatan peran petani secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi termasuk operasi dan pemeliharaan seperti melalui sistem *out-contracting*.
- vi. Peningkatan efisiensi pemanfaatan air irigasi dengan teknologi pertanian hemat air seperti *System of Rice Intensification/SRI*, mengembangkan konsep pemanfaatan

air limbah yang aman untuk pertanian dan menggunakan kembali air buangan dari sawah (*water reuse*).

- vii. Internalisasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (PPSIP) dalam dokumen perencanaan daerah. Pengelolaan lahan rawa berkelanjutan melalui pengelolaan lahan rawa yang dapat mendukung peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pengelolaan tersebut terhadap kelestarian lingkungan hidup.

3. Penguatan Kelembagaan Petani

Kegiatan pertanian secara alami melibatkan sumberdaya manusia (petani) yang cukup banyak, serta sarana produksi dan permodalan yang cukup besar. Selain itu juga sangat berhubungan erat dengan sumber inovasi teknologi dan informasi mulai dari hulu sampai hilir. Dengan karakteristik seperti ini maka untuk mempermudah melakukan koordinasi sangat diperlukan kelembagaan petani. Melalui kelembagaan petani, mereka dengan mudah melakukan koordinasi diantara mereka dan antara kelompok. Demikian juga melalui kelompok maka akan memperkuat posisi tawar dalam pasar yang kompetitif. Menyadari manfaat keberadaan kelompok tani maka ke depan upaya-upaya yang perlu dilakukan diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas dari kelompok dan gabungan kelompok tani;
- b. Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis untuk memperkuat kemampuan baik dari segi aspek manajemen kelompok, kegiatan budidaya maupun dalam aspek pengolahan dan pemasaran;
- c. Memperluas jenis kelompok tani sesuai dengan bidang usaha, misalnya kelompok Pengendalian Hama Terpadu, Inseminasi Buatan, Perhimpunan Petani Pemakai Air, kelompok usaha pengolahan;
- d. Memperkuat modal usaha bagi kelompok/gabungan kelompok melalui pemberian bantuan modal, serta memperkuat jaringan kelompok tani dengan penyuluh lapangan.

Dari Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) yang di keluarkan oleh Kementerian Pertanian ini kemudian di transformasikan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang sebagai SKPD yang menjalankan tupoksi di sektor pertanian. Adanya acuan mengenai pembangunan pertanian dari Kementerian Pertanian ini memudahkan bagi daerah untuk menentukan pembangunan pertanian yang sesuai dengan arah kebijakan Indonesia yang di sinergikan dengan kemampuan dan juga potensi Kabupaten Malang, Visi dan Misi Kabupaten Malang, Misi Dinas

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang dan Kajian Lingkungan Hidup

Dimana Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) dari Kementerian Pertanian ini di laksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang dengan menyusun beberapa program kegiatan yang berkaitan dengan arah Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) Kementerian Pertanian.

F. Revolusi Hijau

Istilah revolusi hijau pertama kali dicetuskan oleh William S. Gaud, administrator USAID (*US Agency for International Development*). Revolusi hijau dilakukan untuk menunjukkan kenaikan produksi pertanian, terutama padi dan gandum, yang drastis di negara-negara berkembang dengan menggunakan varietas berdaya hasil tinggi (*high yielding varieties/HYV*). Adanya revolusi hijau ini pertama kali dipelopori pelaksanaannya oleh Nourman Borlaug, seorang pemulia tanaman asal Amerika Serikat yang melakukan penelitian di Meksiko di era 1940-an. Dari hasil penelitian tersebut, Meksiko berhasil mengatasi masalah kekurangan pangan. Keberhasilan Meksiko ini kemudian diikuti negara-negara seperti: India, Indonesia, Pakistan, Thailand, Filipina, dan juga Amerika Serikat.

Revolusi hijau di Indonesia pertama kali dimulai pada Agustus 1963 dengan memberi penyuluhan pertanian dalam bentuk *action research* yang

diberi nama Pilot Proyek Panca Usaha Lengkap. Pilot proyek ini berhasil meningkatkan produksi padi dan pendapatan petani secara meyakinkan, maka sejak saat itu revolusi hijau diterapkan secara bertahap di Indonesia. Revolusi hijau dengan kerja keras para petani telah membawa Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984 yang kemudian mendapat penghargaan dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atas keberhasilan tersebut. Dalam usaha mencapai swasembada beras tersebut, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sarana dan prasarana pertanian dengan sangat serius seperti:

1. Pembangunan bendungan dan saluran irigasi serta sentra produksi padi
2. Subsidi pupuk dan pestisida diberikan untuk mendukung produksi padi
3. Kredit untuk petani dikururkan dengan deras
4. Penyuluhan pertanian diperkuat
5. Pasar beras dijamin dengan didirikannya Badan Urusan Logistik (BULOG)

Dari adanya revolusi hijau, produksi beras di Indonesia meningkat 289% (hampir 4x lipat) dalam waktu 30 tahun. Tetapi dibalik itu semua, terdapat berbagai masalah yang muncul, revolusi hijau mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti: eksplosi hama, hama yang resisten terhadap pestisida, hilangnya varietas-varietas padi unggul lokal, pendangkalan danau oleh gulma air (terutama eceng gondok) yang semakin subur akibat pencucian hara dari sawah, lahan sawah mengalami degradasi, petani yang keracunan pestisida, dsb (Poerwanto, dkk, 2012:6-9). Selain itu, revolusi hijau menyebabkan efek lain pada lingkungan seperti: tercemarnya air dan tanah dengan bahan kimia

beracun, punahnya keanekaragaman hayati di sekitar lahan pertanian, dan tingginya residu pestisida pada produk pangan (Sulaeman, 2012:20).

Revolusi hijau merupakan salah satu program yang pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia demi meningkatkan hasil pertanian di Era Orde Baru. Dimana tujuan utama dari revolusi hijau adalah untuk menaikkan produktifitas sektor pertanian, khususnya sub-sektor pertanian pangan, melalui paket teknologi pertanian modern, yang terdiri dari: pupuk non-organik, obat-obatan pelindung tanaman, dan bibit padi unggul. Disamping untuk menaikkan hasil pertanian, penggunaan bahan-bahan kimia ini banyak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan terutama pada para petani yang kontak langsung dengan bahan-bahan kimia tersebut.

G. Swasembada Beras

Swasembada Beras adalah suatu keadaan tercukupinya kebutuhan konsumsi beras dalam negeri oleh produksi beras nasional (Rahayu 2016:12). Menurut Widodo (2011:40) Swasembada beras pertama kali terjadi di Indonesia pada tahun sekitar 1984, yang saat itu bertepatan dengan berakhirnya Pembangunan Lima Tahun (PELITA) III tahun 1983 yang mana bertahan hingga 10 tahun dan mendapatkan penghargaan dari FAO. Pencapaian swasembada beras ini merupakan hasil dari adanya Revolusi Hijau pada tahun 1963. Untuk mencapai swasembada beras saat itu dilakukan berbagai upaya seperti:

1. Investasi besar di bidang penyediaan teknologi. Penyediaan teknologi di upayakan dengan mengembangkan lembaga penelitian nasional dan menjalin jaringan penelitian internasional dengan IRRI.
2. Irigasi. Investasi bangunan irigasi besar dengan bantuan dari *World Bank*
3. Input modern. Penyediaan input modern dalam jumlah dan distribusi yang terjangkau diupayakan dengan mendirikan pabrik pupuk, pestisida, pengaturan distribusi pupuk, dan subsidi harga pupuk dan pestisida.
4. Pendidikan/penyuluhan. Penyuluhan dilakukan dengan mengembangkan sistem Latihan dan Kunjungan (LAKU) dengan kombinasi rekayasa sosial kelompok tani sehamparan dalam Insus.

Menurut Darwanto (2011:64) Upaya pemerintah untuk peningkatan produksi beras kemudian semakin di tingkatkan pada REPELITA IV tahun 1984-1988 dengan meningkatkan sarana dan prasarana, termasuk input penunjang produksi padi di seluruh daerah dengan mengutamakan perhatian pada daerah-daerah sentra produksi padi. Upaya pengerahan segala upaya di bidang pangan yang di mulai dengan perbaikan kondisi lapangan dan usaha tani hingga kelembagaan pertanian yang didukung oleh kondisi iklim yang baik ternyata menghasilkan peningkatan produksi beras yang relatif tinggi. Saat itu produksi padi mencapai 25.9 juta ton beras. Pada saat itu terjadi kelebihan stok beras nasional sehingga dilakukan ekspor beras termasuk untuk program bantuan ke Afrika yang kekurangan pangan. Dampak dari prestasi pencapaian

swasembada beras selama empat dekade adalah menerima penghargaan FAO karena telah mampu menjadi negara pengekspor beras.

Kemudian terdapat kebijakan pertanian di bidang pangan yang dilakukan dengan melarang penggunaan 57 jenis pestisida yang tertuang dalam INPRES No.3/1986. Tetapi pada tahun 1987 terjadi kemarau panjang yang sangat kering dan terjadi penurunan produksi beras nasional sehingga pemerintah harus melakukan impor beras untuk mengamankan stok.

Saat ini swasembada padi (beras) menjadi salah satu poin dalam sasaran Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) Kementerian Pertanian 2015-2019, yakni:

1. Pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging
2. Peningkatan diversifikasi atau penganekaragaman pangan
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor
4. Penyediaan bahan baku bioindustry dan bioenergy
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif termasuk dalam metode penelitian yang menguraikan temuan fakta dan fenomena di dalam penelitian tanpa harus menggunakan skala hipotesis, hanya menguraikan dan menjabarkan temuan di lapangan.

Menurut Sugiyono (2012:7) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengambilan sampel sumber data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Kemudian Sugiyono juga mengatakan bahwa metode kualitatif sering disebut juga dengan penelitian yang naturalistic, karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah, serta dikatakan metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2012:8)

Arikunto (2010:3) mengatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang sederhana bila dibandingkan dengan penelitian-penelitian lainnya, karena di dalam penelitian deskriptif ini tidak mengubah data dan fakta di lapangan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk memberikan pemahaman serta batasan-batasan terhadap penelitian, sehingga tujuannya dapat memahami dan memudahkan penelitian dan penelitian dapat terarah sesuai dengan tujuan penelitian

Menurut Sugiyono (2012:207) fokus dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan adanya batasan ini, peneliti hanya fokus dalam permasalahan yang menjadi tujuan penulis.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi yang di laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam Mewujudkan Swasembada Beras di lihat dari beberapa Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian antara lain:
 - a. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan
 - b. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian
 - c. Penguatan kelembagaan petani
2. Menghadapi tantangan ke depan
 - a. Menghadapi luas lahan pertanian yang berkurang
 - b. Menghadapi Sumber Daya Manusia yang mulai meninggalkan sektor pertanian
 - c. Menghadapi alur distribusi beras yang terlalu panjang

3. Pengembangan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam menghadapi tantangan ke depan.
 - a. Menentukan pengembangan strategi untuk menghadapi tantangan ke depan

C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau letak dimana penelitian dilakukan. Dengan ditetapkannya lokasi penelitian di dalam penelitian, akan lebih mudah untuk mengetahui tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Menurut Lofland and Lofland (Ulum, 2013:53) terdapat 4 alasan pemilihan tempat penelitian, diantaranya:

1. Menarik minat peneliti dan secara nyata berlokasi di suatu tempat
2. Terdapat pengalaman sosial yang memiliki pola tidak tetap
3. Adanya keunikan individu dan jenis setting yang tidak asli serta banyaknya bentuk pengalaman sosial
4. Adanya masalah yang diteliti belum mendapatkan solusi

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti memilih lokasi di Kabupaten Malang. Hal tersebut atas pertimbangan bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 Kabupaten Malang mengalami surplus beras dan sebagai Kabupaten penyangga kebutuhan beras di wilayah Malang Raya.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti akan menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti guna memperoleh data yang valid, akurat, dan benar-benar dibutuhkan. Penentuan lokasi telah ditentukan

sebelumnya yakni di Kabupaten Malang dengan pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Situs penelitian berkaitan juga dengan lokasi penelitian, sehingga situs penelitian dalam penelitian ini adalah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian memerlukan data baik untuk deskripsi dan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Data tersebut merupakan fakta yang dikumpulkan dalam penelitian. Menurut Arikunto (2003:172) yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Sumber dari data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau dapat dikatakan *first-hand information*. Sumber data primer adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, Bapak Ajunuddin
- b. Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, Bapak Slamet Budi Samsul

- c. Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, Bapak Rony.
- d. Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, Bapak Suwaji.
- e. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Bapak Heri Saputra
- f. Kepala Seksi Distribusi dan Akses Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Bapak Jusuf.
- g. Ketua Gabungan Kelompok Tani Bumi Makmur, Desa Curungrejo, Kecamatan Kepanjen, Bapak Suprpto.
- h. Sekretaris Gabungan Kelompok Tani Bumi Makmur dan Ketua Kelompok Wanita Tani Cinde Wilis, Ibu Wiji Rahayu
- i. Petani sekaligus pemilik lahan sawah di Desa Asrikaton Kecamatan Pakis, Bapak Khoirudin

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat mendukung dan memperkuat data primer. Sumber data sekunder berasal dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, catatan-catatan, dan laporan resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021, Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Malang, Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting, karena tujuan dari penelitian sebenarnya adalah untuk mendapatkan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik yang diungkapkan oleh Burhan Bungin (2010:107), dimana manfaat secara empiris penggunaan metode pengumpulan data kualitatif adalah dengan metode wawancara mendalam, observasi, serta bahan dokumenter, yang akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini:

1. Wawancara

Menurut Moleong (2006:187) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan petunjuk

umum. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara tatap muka, dengan atau tanpa pedoman wawancara, dimana peneliti dan informan terlibat dalam kehidupan sosial

2. Observasi

Menurut Arikunto (2010:124) observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. Sedangkan menurut Nasution dalam Sugiyono (2012:226) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:158) dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, dsb. Sedangkan menurut Sugiyono (2011:329) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya: sejarah kehidupan, peraturan dan kebijakan, dokumen yang berbentuk gambar, misalnya: foto atau gambar. Hasil penelitian dari

observasi atau wawancara akan lebih kredibel (dapat dipercaya) jika didukung oleh sejarah di masyarakat.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan seperangkat peralatan yang digunakan oleh peneliti untuk mengambil data, mengelola, menyajikan, menganalisis, dan mendeskripsikan data atau informasi yang telah didapatkan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti

Dalam penelitian kualitatif peran peneliti sendiri sangat penting, dimana peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya (Moleong: 2000:121). Disamping itu, ketika peneliti sendiri yang menjadi instrumen, peneliti dapat secara mudah memutuskan sesuatu melalui penilaian keadaan yang ada di lapangan.

2. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

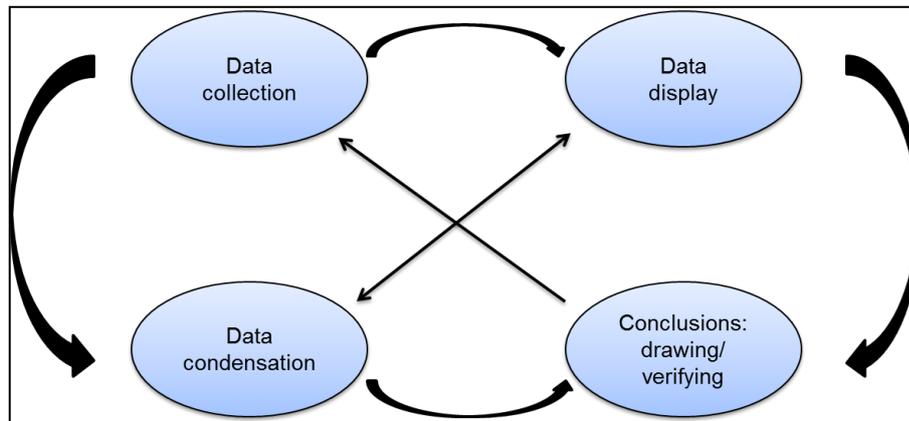
Pedoman wawancara merupakan daftar pertanyaan untuk memandu wawancara. Hal ini dimaksudkan agar wawancara bisa dilakukan secara mendalam dan tidak melebar dari fokus yang diteliti. Pedoman wawancara dibuat oleh peneliti dengan cara mendalami fokus permasalahan yang diteliti dan mendalami teori yang digunakan.

3. Perangkat Penunjang

Perangkat penunjang dalam penelitian ini terdiri dari buku catatan, bolpoint atau pensil, kamera *handphone*, dan alat perekam suara. Instrumen-instrumen ini membantu peneliti dalam melakukan dokumentasi, sehingga apa yang terjadi di lapangan dapat di dokumentasikan dengan baik. Instrumen ini juga membantu peneliti dalam pengarsipan data yang di dapat selama di lapangan, sehingga memudahkan peneliti saat melakukan proses analisis data.

G. Metode Analisis

Bagian terpenting dari pembahasan sebuah penelitian adalah analisis dan interpretasi data. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:14) analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclutions drawing/verification*) sebagai sesuatu yang terjalin merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Aktivitas dalam analisis dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3.1 Model Analisis Data Interaktif
 sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14)

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting untuk dilakukan, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka, proses penelitian akan berlangsung sampai penelitian mendapat jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, observasi atau pengamatan dan dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, data tersebut kemudian ditelaah. Pada tahapan ini, peneliti mengabaikan data yang tidak berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga data dalam tahapan ini hanya berhubungan dengan judul penelitian.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data berisi kumpulan informasi dalam bentuk laporan yang didapatkan dari situs penelitian. Penyajian data juga diikuti dengan analisis data. Penyajian data yang paling sering dilakukan pada data

kualitatif adalah menggunakan bentuk teks naratif, tetapi ada beberapa bentuk penyajian data dengan menggunakan grafik, matriks, jaringan dan bagan. Pada penelitian ini, peneliti menyajikan dalam bentuk naratif. Dengan adanya penyajian data, akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan menyimpulkan dari temuan-temuan penelitian untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan sepanjang pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk meninjau ulang catatan lapangan agar dapat menemukan makna dari data yang didapat yaitu mencari pola, tema, hubungan yang sama, hal-hal yang sering muncul, maupun hal-hal yang jarang serta hal-hal lainnya untuk menemukan suatu kesimpulan sementara. Selanjutnya dari kesimpulan sementara tersebut peneliti akan berusaha untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat final.

H. Keabsahan Data

Langkah untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dalam penelitian kualitatif adalah dengan cara pengecekan keabsahan data dan temuan. Selain hal tersebut, pengujian keabsahan sangat berguna untuk menjaga validitas data suatu penelitian. Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa uji keabsahan

data di dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas). Keempat hal tersebut merupakan unsur dalam pengujian keabsahan data temuan dari metode penelitian kualitatif.

Teknik pengujian kredibilitas data dalam penelitian kualitatif dapat diketahui dengan berbagai macam cara. Peneliti dalam menguji keabsahan data penelitian dengan menggunakan cara uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil temuan penelitian kualitatif antara lain sebagai berikut:

- a. Perpanjangan pengamatan
- b. Peningkatan ketekunan
- c. Triangulasi
- d. Menggunakan bahan referensi
- e. Analisis kasus negatif
- f. Mengadakan member check

Namun, pada penelitian ini, peneliti dalam mengujikan keabsahan data hanya menggunakan teknik uji kredibilitas data dengan menggunakan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dan triangulasi. Sedangkan teknik lainnya dalam uji kredibilitas tidak digunakan oleh peneliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang



Gambar 4.1 Wilayah Kabupaten Malang
Sumber: <https://cakmaryono.com/malang-rama>

Visi Kabupaten Malang:

*“Terwujudnya Kabupaten Malang Yang MADEP MANTEB
MANETEP”*

Misi Kabupaten Malang untuk 5 tahun ke depan adalah:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum.
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa.
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan.
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

a. Kondisi Geografi dan Topografi Kabupaten Malang

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Jawa Timur. Terletak diantara $112^{\circ}17',10,90''$ Bujur Timur dan $112^{\circ}57',00,00''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ}44',55,11''$ Lintang Selatan dan $8^{\circ}26',35,45''$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah sekitar $2.977,05 \text{ km}^2$ yang memiliki batas wilayah:

Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo,
Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang

Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang

Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sedangkan untuk batas wilayah administrasi Kabupaten Malang (lingkaran dalam wilayah daerah) berbatasan dengan Kota Malang seperti wilayah: Kecamatan Tajinan, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakis, dan Kecamatan Tumpang.

Secara administratif kewilayahan, Kabupaten Malang terbagi atas 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 1.368 Dusun, 3.183 Rukun Warga (RW), dan 14.869 Rukun Tetangga (RT). Pusat Pemerintahan Kabupaten Malang berada di Kecamatan Kepanjen.

Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter di atas permukaan laut (dpl) yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) di bagian selatan pada ketinggian 0-650 meter dpl, daerah lereng Tengger-Semeru di bagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3.600 meter dpl dan daerah lereng Kawi-Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dpl. Dengan didukung oleh suhu udara yang rata-rata relatif sedang, berkisar antara 23,3 hingga 27,1°C, dan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 61 hingga 90% serta curah hujan rata-rata berkisar antara 45 hingga 628 mm. Kondisi topografi wilayah daratan Kabupaten Malang terbagi menjadi 2 aspek antara lain:

1. Ketinggian Lahan

Secara topografi wilayah daratan Kabupaten Malang dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian, yaitu:

- a. Ketinggian 0-100 meter permukaan laut: 0% dari seluruh wilayah dengan topografi relatif datar dan bergelombang.
- b. Ketinggian 100-500 meter permukaan laut: 75,76% dari seluruh wilayah dengan topografi bergelombang dan bergurun.

- c. Ketinggian 500-1000 meter permukaan laut: 18,18% dari seluruh wilayah dengan kondisi berbukit.
- d. Ketinggian lebih dari 1000 meter permukaan laut: 3,03% dari seluruh wilayah dengan topografi bergunung dan terjal.

2. Kemiringan Lereng

Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang mempunyai kemiringan lereng 48,69% hampir diseluruh dataran rendah Kabupaten Malang, sedangkan untuk kemiringan lereng 28,85% berada pada daerah perbukitan dan pegunungan, kemiringan lereng >22,46% berada pada daerah pegunungan.

b. Kondisi Geologi Kabupaten Malang

Ditinjau dari keadaan geologinya, sebagian besar wilayah Kabupaten Malang terbentuk dari hasil gunung api kwarter muda yang meliputi areal seluas 44,25% atau 148.152,52 Ha dari seluruh luas Kabupaten Malang, sedangkan sebagian kecil merupakan *miosen facies* baru gamping dengan luas 90.884,00 Ha atau 27,15% dari luas Kabupaten Malang seluruhnya. Jenis tanah di Kabupaten Malang terdiri dari jenis tanah alluvial, regosol, *brown forest*, andosol, latosol, mediteran dan litosol. Jenis tanah ini tidak seluruhnya tersebar di Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang.

c. Hidrologi

Kabupaten Malang yang merupakan salah satu daerah dataran tinggi memiliki drainase yang baik, yakni tidak pernah tergenang air kecuali pada dataran-dataran yang kemampuan saluran drainase nya bermasalah. Drainase tanah menunjukkan lama dan seringnya tanah jenuh terhadap kandungan air dan menunjukkan kecepatan resapan air dari permukaan tanah. Di Kabupaten Malang, terdapat genangan air berupa waduk Karangates dan Selorejo yang menjadi muara drainase dari berbagai wilayah.

Kabupaten Malang di lalui oleh beberapa sungai besar dan anak sungai, anak-anak sungai yang ada sebagian dari Kali Konto dan Kali Brantas, sungai-sungai tersebut ada beberapa yang masuk di waduk-waduk Karangates dan Selorejo, ada juga yang masuk Samudera Indonesia dan Laut Jawa. Berdasarkan data Kabupaten Malang, terdapat 588 mata air dengan debit 1 sampai di atas 200 liter/detik, debit tertinggi terdapat di Desa Wendit, Kecamatan Pakis yakni hingga 1.100 liter/detik. Sedangkan kecamatan yang memiliki debit air lebih dari 200 liter/detik adalah mata air yang berada di kecamatan Tumpang, Pakis, Singosari, Gondanglegi, Sumberpucung, Ngajum, Wagir, Ampelgading, dan Dampit.

d. Klimatologi

Kabupaten Malang memiliki iklim tropis dengan suhu udara antara 18,25°C sampai dengan 31,45°C (suhu rata-rata dari empat stasiun pengamat cuaca antara 23°C sampai 25°C). Tekanan udara yang paling tinggi dari empat stasiun pengamat cuaca terjadi di Singosari 1.012,70 dan yang lain masih di bawah angka tersebut. Kelemahan udara yang diteliti lewat keempat stasiun, Stasiun Lawang 2.423 adalah menunjukkan angka tertinggi 84 % dan rata-rata kecepatan angin di empat stasiun pengamat antara 1,8 sampai dengan 4,7 Km/jam. Untuk curah hujan di Kabupaten Malang rata-rata pertahunnya 1.596 mm dengan hari hujan 84,85 per tahun, curah hujan turun antara bulan April-Oktober. Diantara kedua musim tersebut ada musim peralihan antara bulan April - Mei dan Oktober-November.

e. Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Malang

Kabupaten Malang secara demografi terbagi menjadi 33 kecamatan yang terdiri dari 12 kelurahan dan 378 desa. Ditinjau dari potensi sumber daya alamnya, Kabupaten Malang cukup potensial untuk pengembangan tanaman pangan seperti padi, palawija dan hortikultura (sayuran, buah-buahan dan tanaman hias serta biofarmaka/tanaman obat keluarga) serta beberapa daerah dikembangkan tanaman perkebunan seperti kopi, tebu, nilam dan kakao. Berdasarkan kondisi fisik dan alam wilayah Kabupaten Malang dapat digolongkan menjadi:

- i. Daerah Subur Malang Tengah dan Utara

Merupakan daerah dengan ketinggian medium untuk persawahan, irigasi teknis dan dominasi tanaman padi yang meliputi Kecamatan Kepanjen, Bululawang, Tumpang dan Singosari.

ii. Daerah Subur Malang Barat dan Timur

Merupakan daerah tinggi dominan tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan dataran tinggi, kopi, cengkeh dan kakao yang meliputi sebagian Kecamatan Pujon, Dampit, Poncokusumo, Jabung, Wonosari, Ngajum, Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan dan Ampelgading.

iii. Daerah Subur Malang Selatan

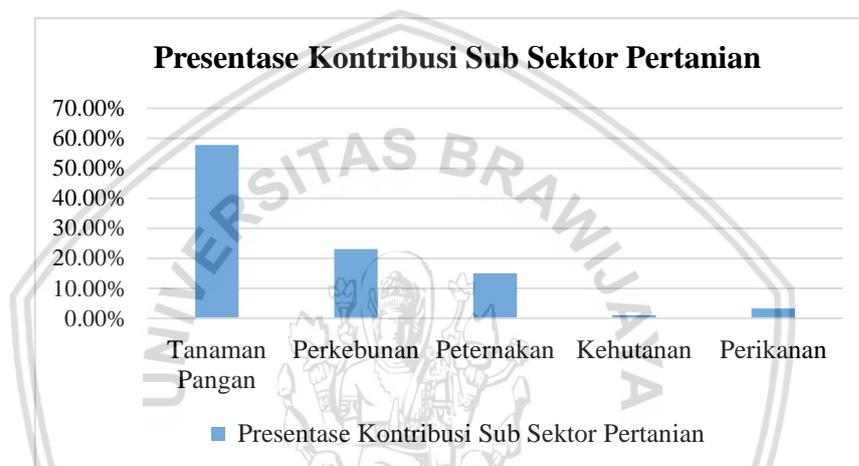
Merupakan pegunungan kapur daerah kritis/semi kritis, dominan tanaman jagung, ubi kayu, tebu dan kakao yang meliputi Kecamatan Pagak, Donomulyo, Kalipare, Bantur dan Gedangan.

f. Kondisi Pertanian di Kabupaten Malang

Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Malang beraneka ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, perkebunan, sayuran, peternakan dan perikanan. Unggulan tanaman pangan seperti: padi, jagung, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan, sedangkan unggulan perkebunan seperti: tebu, kopi, kakao, dan kelapa, untuk komoditi sayuran terdiri dari: kentang,

kubis, cabe dan tomat. Terdapat komoditas khas Kabupaten Malang yaitu: apel, jeruk, klengkeng, salak Swaru, dan ketela Gunung Kawi.

Sub sektor pertanian yang memegang peranan besar terhadap sektor pertanian adalah sub sektor tanaman pangan yaitu sebesar 57,77 % yang disajikan ke dalam grafik di bawah ini:



Grafik 4.1 Presentase Kontribusi Sub Sektor Pertanian

Sumber: Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang 2016-2021, 2017

Kontribusi terhadap PDRB inilah yang menjadi potensi sekaligus menjadi input bagi pemerintah Kabupaten Malang untuk menggerakkan sektor pertanian pedesaan guna peningkatan perekonomian regional. Peningkatan pembangunan pertanian diharapkan dapat menjadi *multiplier effect* bagi pembangunan daerah secara keseluruhan di Kabupaten Malang.

Pembangunan pertanian di Kabupaten Malang dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis

serta persoalan mendasar sektor pertanian seperti meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi, perubahan Iklim Global, perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan perbibitan, serta terbatasnya akses petani terhadap permodalan, maka koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian menjadi salah satu faktor utama guna menghadapi banyak tantangan.

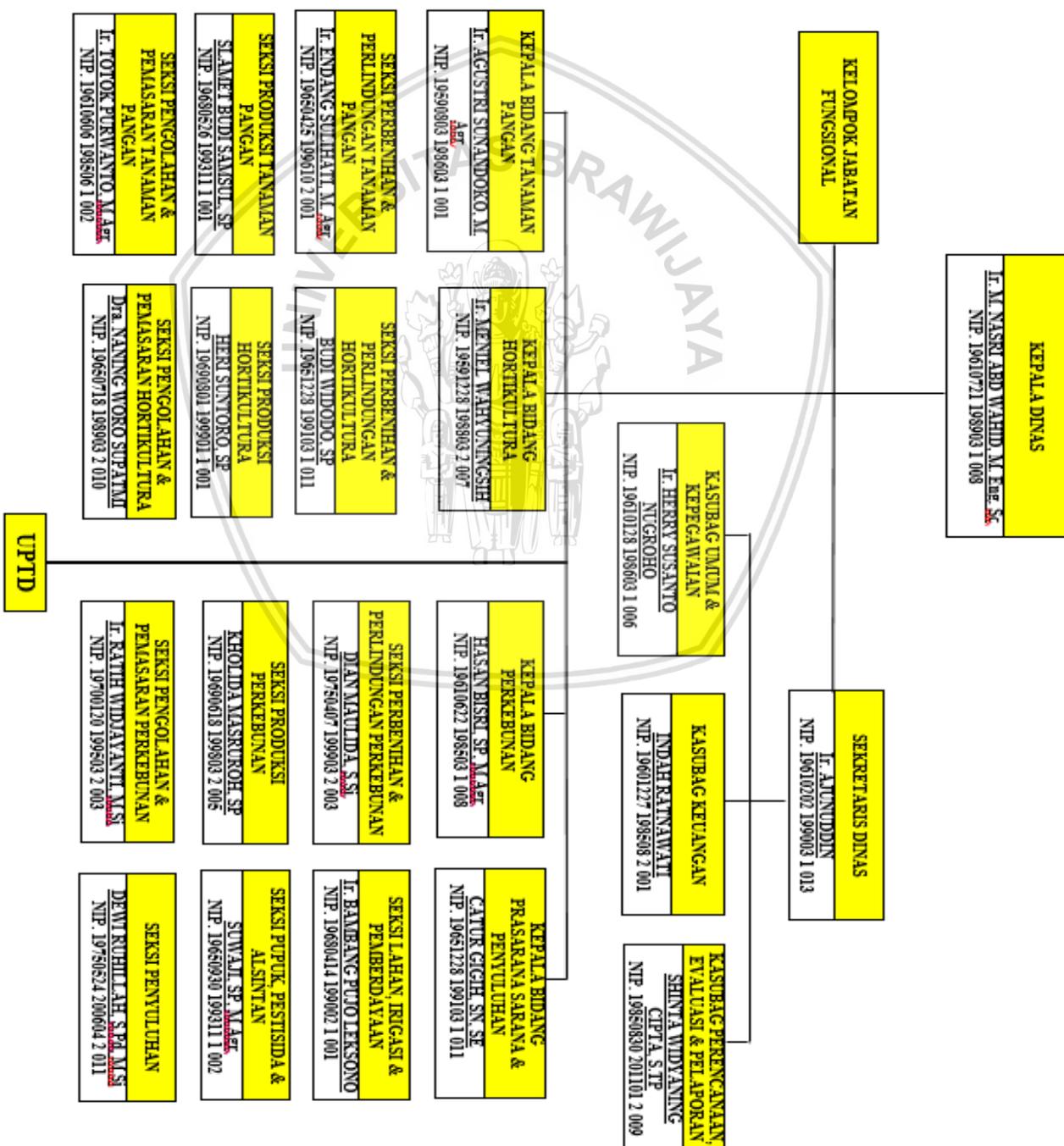
2. Gambaran Umum Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang

Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berdasar pada Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Tanaman Pangan
- d. Bidang Hortikultura
- e. Bidang Perkebunan

- f. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut adalah gambar struktur organisasi dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang

sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, 2017



Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

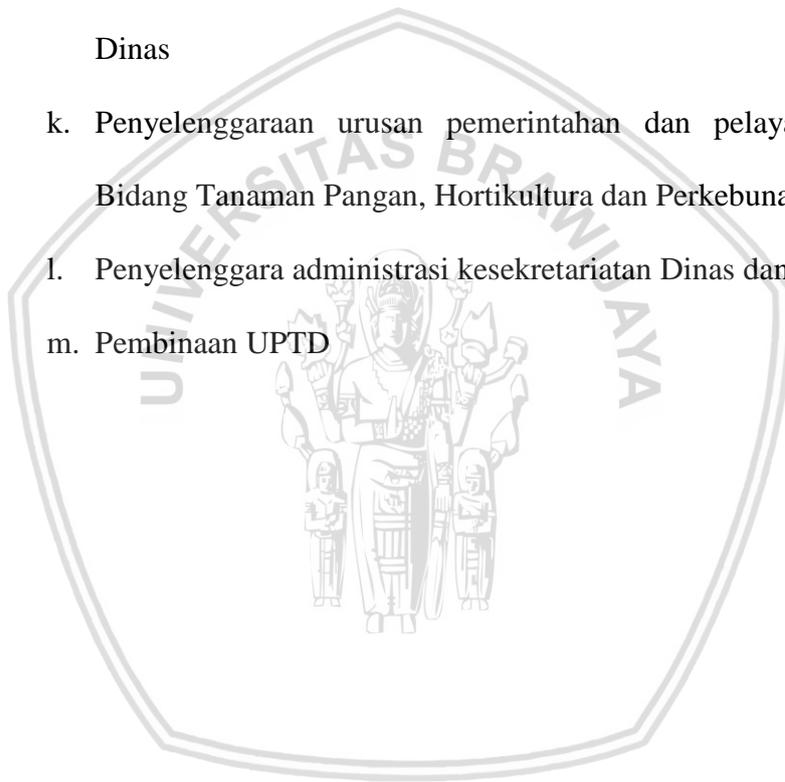
Tugas:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan perkebunan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- c. Pengumpulan, pengelolaan, dan pengendalian data yang berbentuk database serta analisis data
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- e. Pembinaan produksi di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- f. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman

- g. Pembinaan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian
- h. Pemberian rekomendasi teknis pertanian
- i. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian dan perkebunan
- j. Pengoordinasian, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas
- k. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- l. Penyelenggara administrasi kesekretariatan Dinas dan
- m. Pembinaan UPTD

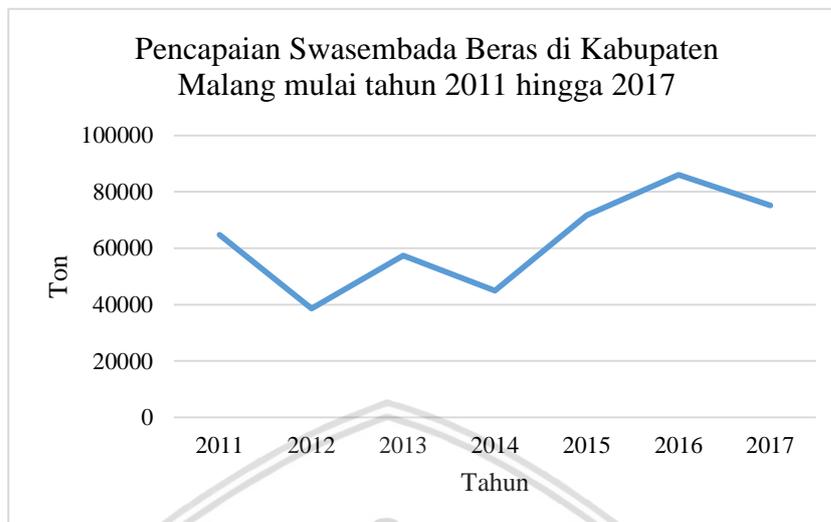


B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Strategi Pemerintah Kabupaten Malang dalam Mewujudkan Swasembada Beras

Kemampuan Kabupaten Malang untuk memproduksi beras hingga surplus ini merupakan suatu keberhasilan di bidang pertanian khususnya Tanaman Pangan, yang di dukung dengan wilayah Kabupaten Malang yang terletak di daerah sejuk dan berpotensi untuk bercocok tanam, serta kontribusi tanaman pangan ini sangat berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Malang. Melihat potensi-potensi inilah yang menjadi menjadi input bagi pemerintah Kabupaten Malang untuk menggerakkan sektor pertanian untuk meningkatkan perekonomian.

Adanya Otonomi Daerah, memudahkan bagi daerah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan termasuk menentukan strategi-strategi untuk mencapai keberhasilan dari suatu program. Pencapaian swasembada beras di Kabupaten Malang ini dapat terwujud karena Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang melaksanakan strategi-strategi untuk mewujudkan swasembada beras sejak tahun 2011 hingga saat ini. Berikut adalah tabel pencapaian swasembada beras dari tahun 2011 hingga 2017:



Grafik 4.2 Pencapaian Swasembada Beras di Kabupaten Malang Tahun 2011 Hingga 2017

sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, 2017

Kondisi swasembada beras di Kabupaten Malang selama beberapa tahun ini mengalami naik turun yang tidak terlalu drastis. Pencapaian swasembada beras tertinggi di Kabupaten Malang terjadi pada tahun 2016. Yang mana untuk mencapai kondisi tersebut Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang melaksanakan strategi yakni melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan luas panen (ha), produksi (ton), produktivitas (ku/ha) dan penyediaan sarana dan prasarana pertanian.

Melihat kondisi swasembada beras di Kabupaten Malang yang terus terjadi dan mengalami kondisi yang selalu naik turun, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, melaksanakan strategi-strategi agar swasembada beras di Kabupaten Malang dapat terus terjadi di tengah hambatan-hambatan yang ada di masa depan. Strategi yang

dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang ini mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 yang kemudian di transformasikan ke dalam bentuk-bentuk program kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan dan juga potensi Kabupaten Malang. Program-Program tersebut dilaksanakan dengan melakukan beberapa fokus kegiatan seperti: peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, dan penguatan kelembagaan petani.

a. Peningkatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Lahan

Untuk meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan lahan di Kabupaten Malang, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang melakukan strategi seperti: intensifikasi lahan, meningkatkan indeks pertanaman dan mengganti lahan kering menjadi lahan sawah. Dengan adanya strategi tersebut, diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan produksi beras yang merupakan fokus Pemerintah Kabupaten Malang untuk melaksanakan swasembada beras.

Seperti halnya yang dikatakan oleh narasumber. Menurut Bapak Ajunuddin selaku Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, strategi pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk melaksanakan swasembada beras ini adalah dengan meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, yang mana beliau menyebutkan:

“Untuk meningkatkan ketersediaan lahan pertanian di Kabupaten Malang, dilakukan dengan menambah luas lahan pertanian, tetapi untuk menambah luas lahan pertanian ini memang agak sulit. Namun, bisa dilakukan dengan merubah lahan kering menjadi lahan basah atau sawah. Dewasa ini kan lahan pertanian itu semakin berkurang ya, bukannya bertambah kan. Nah, makanya sekarang ini dikeluarkan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.” (wawancara dilaksanakan pada 26 Maret 2018)

Sebagai salah satu strategi untuk menyiasati lahan sawah yang akan terus mengalami penurunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang melakukan peningkatan indeks pertanaman. Indeks pertanaman ini merupakan strategi yang paling memungkinkan bagi dinas untuk dilakukan, karena untuk menambah lahan pertanian sendiri di Kabupaten Malang, dinas merasa kesulitan. Maka dari itu strategi dinas dalam rangka meningkatkan ketersediaan lahan pertanian di Kabupaten Malang, di siasati dengan menaikkan indeks pertanaman seperti yang dijelaskan oleh Bapak Slamet selaku Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang dibawah ini:

“untuk meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Malang ini dapat dilakukan dengan meningkatkan indeks pertanaman dan intensifikasi lahan mbak, indeks pertanaman ini ditingkatkan agar lahan pertanian yang awalnya dalam 1 tahun bisa panen 2x, ini ditingkatkan agar dapat 3x panen dalam 1 tahun. Ini yang sangat mungkin bagi kami untuk dilakukan, dan saat ini kami sedang melakukan bagaimana meningkatkan IP di Kabupaten Malang. Selain itu, dapat dilakukan dengan intensifikasi lahan, intensifikasi lahan ini dilakukan dengan menambah rata-rata produktivitas dari satuan hektar lahan pertanian. Sekarang ini rata-rata produktivitasnya di Kabupaten Malang 7,1 ton per hektarnya. Kalo tingkat produktivitasnya semakin tinggi maka hasil produksinya juga tinggi.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2018)

Dalam rangka menjaga pemanfaatan lahan agar kesuburan lahan pertanian di Kabupaten Malang ini tetap terjaga. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang menerapkan penggunaan pupuk berimbang yang telah di anjurkan oleh Kementerian Pertanian. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Ajunadin selaku Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, di bawah ini:

“Agar tanah pertanian tetap terjaga kesuburannya dan bisa mewujudkan swasembada yang berkelanjutan, maka yang dilakukan adalah pengendalian penggunaan zat-zat kimia agar lingkungan hidupnya tetap terjaga, seperti digalakkan pembuatan pupuk organik, pestisida alami dan penerapan non pestisida pada sektor pertanian. Penggunaan pupuk berimbang antara pupuk organik dan pupuk kimia ini sangat penting.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2018)

Melihat tanggapan dari Bapak Ajunadin terkait penggunaan pupuk berimbang untuk menjaga kesuburan lahan pertanian di Kabupaten Malang, ternyata tanggapan tersebut selaras dengan apa yang di jabarkan oleh Bapak Suprpto, salah satu petani di Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen. Bapak Suprpto mengatakan:

“Disini kami menggunakan pupuk berimbang mbak, seperti dengan anjuran dari pemerintah. Untuk Desa Curungrejo membutuhkan 3500 kwintal pupuk, yang mana luas sawah yang ada di Desa Curungrejo ini seluas 175 Ha. Kita dalam setahun panen 2x. Jadi, porsi penggunaan pupuk disini itu memakai pupuk kimia sebanyak 5 kwintal sama 5 kwintal pupuk organik. Jadi kan 175 hektar x 10 kwintal pupuk organik dan kimia jadi 1750. Jadi di Desa Curungrejo ini sekali panen membutuhkan 1750 kwintal pupuk, nah sedangkan kan kita 2x panen jadi 1750 x 2 jadinya 3500 kwintal” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 April 2018)

Penggunaan pupuk berimbang demi menjaga kesuburan lahan pertanian di Kabupaten Malang merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang dalam meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber diatas, dapat di simpulkan bahwa untuk meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Malang, strategi yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang adalah dengan meningkatkan Indeks Pertanaman karena Dinas merasa kesulitan untuk menambah lahan pertanian baru di Kabupaten Malang, kemudian meningkatkan Intensifikasi lahan agar dapat meningkatkan produktivitas dan yang terakhir adalah pengurangan pupuk dan juga pestisida kimia yang digantikan dengan penggunaan pupuk berimbang antara pupuk organik dan juga pupuk kimia.

b. Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Pertanian

Dalam rangka meningkatkan infrastruktur dan sarana pertanian di Kabupaten Malang, Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Malang melakukan strategi yang mana dapat menunjang peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian. Salah satu infrastruktur pertanian yang menjadi perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Malang

adalah mengenai jaringan irigasi tersier. Jaringan irigasi ini merupakan infrastruktur yang sangat berpengaruh terhadap proses penanaman padi. Maka dari itu, adanya pengawasan terhadap jaringan irigasi ini sangat penting bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang sebagai salah satu instansi yang menaungi sektor pertanian di Kabupaten Malang.

Mengenai pengawasan jaringan irigasi ini, Bapak Rony selaku Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang ini mengatakan:

“Begini, irigasi itu sebetulnya tupoksi yang utama ada di Dinas Pengairan, tetapi kalo Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ini bertugas di jaringan irigasi tersier atau yang kecil-kecil itu. Jadi, kalau tiap tahun itu pengawasannya ada di Dinas Pengairan. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang ini tidak turun langsung mengawasi, tetapi kelompok-kelompok tani ini melaporkan kepada penyuluh dan mantri tani jika ada tersier yang rusak, kemudian penyuluh dan mantri tani ini melaporkan kepada kami, lalu kita akan memperbaiki tersier yang rusak tersebut.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2018)

Menanggapi hal ini, Bapak Suwaji selaku Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang menjelaskan hal-hal teknis untuk mengajukan bantuan pembenahan jaringan irigasi:

“Jadi untuk mengajukan perbaikan tersier kepada kami, sebelumnya para penyuluh, mantri tani dan juga anggota kelompok tani mengadakan rapat untuk memutuskan meminta bantuan, jadi setelah di putuskan untuk meminta bantuan dari kami, laporan proposal yang masuk ke kami tidak langsung kami urus, harus mengantri dengan kelompok tani lain yang laporannya masuk duluan. Jadi jika ada laporan yang masuk perlu dianggarkan terlebih dahulu, kalo dulu

ada DAK tapi sekarang sudah berganti.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2018)

Berdasarkan data dari Kabupaten Malang Dalam Angka tahun 2017, luas lahan sawah sebanyak 45.888 Ha yang ada di Kabupaten Malang, terdiri dari 42.739 Ha lahan sawah yang membutuhkan irigasi, sedangkan sisanya yakni sebanyak 3.149 Ha merupakan sawah tadah hujan. Dimana lahan sawah sebanyak 45.888 Ha ini telah terakomodir dengan adanya infrastruktur yang telah di bangun oleh pihak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Rony di bawah ini:

“Selama ini terdapat beberapa pembangunan infrastruktur pertanian yang telah kami lakukan antara lain: pembangunan jalan pertanian, pengembangan sumber-sumber air dan rehabilitasi jaringan irigasi. Tujuan di adakannya pembangunan jaringan irigasi ini adalah untuk mengembangkan sumber-sumber air yang ada di Kabupaten Malang untuk mengairi lahan pertanian terutama untuk tanaman pangan seperti padi. Selain itu, fasilitas jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Malang ini banyak dan saya kira cukup untuk mengairi sawah-sawah di Kabupaten Malang. Itu ada bendungan tetap, seperti karangkates, terus ada bangunan air dan sumber air, kemudian sumber-sumber pengairan ini di lewatkan jalur pengairan hingga ke sawah-sawah.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2018)

Menurut penjelasan dari Bapak Rony dan data dari dokumen Kabupaten Malang Dalam Angka tahun 2017, bahwa keseluruhan jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Malang, dapat mengairi sawah seluas 46.033 Ha, diantaranya terdapat irigasi teknis, yang dapat mengairi sawah sekitar 28.288 Ha, kemudian irigasi semi teknis, yang dapat mengairi sawah sekitar 11.319 Ha dan irigasi sederhana, yang dapat mengairi sawah

sekitar 6.486 Ha. Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai seperti jaringan irigasi, jadi dapat dikatakan bahwa terkait dengan infrastruktur pertanian yang ada di Kabupaten Malang tidak ada permasalahan.

Kemudian selain meningkatkan infrastruktur, strategi dinas selanjutnya adalah meningkatkan sarana pertanian seperti pupuk dan alat mesin pertanian di Kabupaten Malang. Diketahui saat ini pemerintah sedang menyelenggarakan program penyaluran pupuk bersubsidi di seluruh daerah, termasuk Kabupaten Malang. Paparan dari Bapak Suwaji selaku Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang terkait penyaluran pupuk bersubsidi dan alat mesin bagi kelompok tani di Kabupaten Malang akan di paparkan di bawah ini:

“Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, telah memberikan bantuan alat tanam, namanya *Rice Transplanter*, alat ini digunakan untuk menanam padi. Tetapi ya begitu, kata salah satu petani yang ada di sini alatnya tidak bisa dipakai karena tanahnya rendah, sehingga alat itu tenggelam ke tanah.”
(wawancara dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2018)

Melihat tanggapan dari Bapak Suwaji diatas, peneliti bertanya “apakah jumlah alat mesin pertanian di Kabupaten Malang saat ini telah mencukupi pak?”

Kemudian Bapak Suwaji menjawab:

“untuk saat ini Kabupaten Malang masih butuh banyak alsintan. Kebutuhan akan alsintan ini untuk membantu petani dalam proses produksi pertaniannya dengan menggunakan teknologi tepat guna. Alsintan ini teknologi untuk mempercepat proses pengolahan hingga hasil panen. Dengan alsintan yang ada saat ini, maka untuk memulai masa tanam belum bisa dilakukan secara

serempak, karena petani harus bergantian untuk memakai alsintan tersebut. Bantuan alat mesin pertanian ini hibah mbak, tahun lalu itu dapat 560 unit dari Kementerian Pertanian dan dari APBD sebanyak 83 unit, jadi total bantuan alsintan yang disalurkan sebanyak 643 unit ke sekitar 864 kelompok tani yang ada di Kabupaten Malang.”(wawancara dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2018)

Melihat terbatasnya jumlah alat mesin pertanian yang ada di Kabupaten Malang, lantas peneliti bertanya “bagaimana sikap dinas melihat hal ini?”

Kemudian Bapak Suwaji menjawab:

“kami, setiap tahunnya meminta bantuan alsintan ke pemerintah pusat, kan sekarang ini mengolah lahan dengan menggunakan tenaga manusia sekarang sulit serta butuh biaya yang mahal. Karena terbatasnya alat mesin pertanian, sampai ada kelompok tani yang beli mesin itu sendiri. Ya alat mesin pertanian di Kabupaten Malang memang sangat kurang jumlahnya mbak.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2018)

Dengan melihat tanggapan dari Bapak Suwaji diatas, fakta di lapangan ternyata benar dengan apa yang di paparkan oleh pihak dinas. Yang mana bantuan-bantuan berupa pupuk dan juga alat mesin pertanian ini telah di salurkan dengan sebagaimana mestinya meskipun ketersediaan alat mesin pertanian ini terbatas jumlahnya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Suprpto selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Bumi Makmur, yang mana beliau mengatakan:

“Selama ini bantuan-bantuan seperti pupuk dan juga alat mesin pertanian cukup lancar. Setiap tahun pupuk bersubsidi selalu rutin diberikan, tetapi kalau untuk alat mesin pertanian dan juga benih itu tidak, hanya kalau ada *event* tertentu. Kalau alat mesin pertanian itu bisa sampai 10 tahun sekali diberikan, kan masa

pemakaiannya juga lama. Semua bantuan tersebut termasuk hibah, kecuali yang pupuk bersubsidi itu. Disini sebenarnya sudah ada alat dan mesin-mesin tersebut tetapi lahan di Desa Curungrejo sendiri terlalu dalam, sehingga alatnya juga tidak bisa dipakai dan berjalan. Mungkin di inovasi agar berat dan jenis mesinnya yang lebih ringan.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 April 2018)

Berikut merupakan salah satu gambar yang menunjukkan bahwa petani sedang mengolah lahan sawah dengan menggunakan traktor sebelum di tanami padi.



Gambar 4.3 penggunaan traktor oleh petani
sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa penyaluran alat mesin pertanian di Kabupaten Malang telah tersalurkan dengan baik meskipun jumlah ketersediaannya sangat terbatas. Hal ini dibuktikan dengan gambar diatas yang mana petani sedang membajak sawah dengan menggunakan alat mesin pertanian traktor. Dengan adanya sarana pertanian seperti traktor ini, dapat mengurangi beban kerja petani yang sebelumnya membajak sawah secara manual. Pengawasan terhadap jaringan irigasi dan

menyalurkan bantuan berupa pupuk dan juga alat mesin pertanian merupakan strategi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang untuk meningkatkan infrastruktur dan sarana pertanian di Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber diatas, dapat di simpulkan bahwa untuk meningkatkan infrastruktur dan sarana pertanian di Kabupaten Malang, strategi yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang adalah dengan melakukan pengawasan dan pembangunan jaringan irigasi tersier. Pengawasan terhadap jaringan irigasi tersier ini dibantu oleh petani dan juga para penyuluh serta manteri tani yang mana mereka ini berkaitan langsung dengan apa yang terjadi di lapangan. Kemudian, sarana pertanian seperti pupuk ini telah terselenggara dengan baik, yang mana setiap tahun petani menerima bantuan berupa pupuk subsidi. Terkait dengan alat mesin pertanian di Kabupaten Malang, pemberian bantuan ini bersumber dari Kementerian Pertanian dan hibah dari APBD, yang mana bantuan dari jumlah yang tersedia saat ini sangat terbatas dan tidak memungkinkan untuk di salurkan kepada 864 kelompok tani yang ada di Kabupaten Malang.

c. Penguatan Kelembagaan Petani

Program Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan petani dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian adalah program peningkatan kesejahteraan petani, dimana dalam program tersebut, di jelaskan unsur penting yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani adalah tingkat pendapatan petani.

Kegiatan pertanian melibatkan sumberdaya manusia (petani) yang cukup banyak, serta sarana produksi dan permodalan yang cukup besar. Melalui kelembagaan petani, mereka dengan mudah melakukan koordinasi di antara petani dengan kelompok petani. Menyadari manfaat keberadaan kelompok tani maka ke depan upaya-upaya yang perlu dilakukan diantaranya adalah, meningkatkan kualitas dari kelompok dan gabungan kelompok tani. Hal ini senada dengan penjelasan dari Bapak Suwaji selaku Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang yang mana beliau mengatakan:

“Untuk meningkatkan kualitas dari petani melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan, yang mana kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan ini dilakukan secara rutin. Misalnya para petani yang telah mengadakan rapat di dalam kelompok tani dan menginginkan adanya pelatihan, menentukan hari yang pas untuk diadakan pelatihan. Biasanya para petani ini masih mengandalkan kalender jawa, seperti memilih hari Sabtu Kliwon, dan lain-lain” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2018)

Kemudian terkait dengan pemberian bimbingan dan pendampingan teknis untuk memperkuat kemampuan baik dari segi aspek manajemen

kelompok, kegiatan budidaya, maupun dalam aspek pengolahan dan pemasaran, Dinas bekerja sama dengan Mantri Tani untuk memberikan bimbingan dan juga pendamping seperti yang dikatakan oleh Pak Suwaji seperti berikut:

“Pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada petani ini di mulai dari pra tanam, pengolahan menggunakan alat dan mesin pertanian, bagaimana cara tanam menggunakan alat dan mesin pertanian hingga pelatihan pasca panen yang didalamnya termasuk memasarkan hasil panen seperti bagaimana caranya untuk meningkatkan pendapatan, bagaimana memotong hingga mengeringkan sendiri padi tanpa menyuruh orang lain.”
(wawancara dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2018)

Selain memberikan penyuluhan dan juga sosialisasi, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, Kelompok Tani ini secara mandiri mengadakan studi banding ke berbagai tempat, seperti yang di paparkan oleh Ibu Wiji Rahayu selaku Sekretaris Gabungan Kelompok Tani Bumi Makmur dan Kelompok Wanita Tani Cinde Wilis yang mengatakan:

“kita setiap 3 bulan sekali mengadakan studi banding mbak, kemarin ke hotel utami, di Surabaya untuk mengikuti sosialisasi mengenai Program Tunda Jual. Program Tunda Jual ini, di pinjamkan modal oleh Bank 20 juta untuk membeli gabah kering milik petani disaat harga beras jatuh, tetapi ya gitu mbak, jangka waktu pengembalian nya ini hanya setahun, jadi ya pusing kalo mau mengembalikan dana nya. Kita mengadakan sosialisasi ini biayanya sendiri mbak” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 April 2018)

Petani yang merupakan aktor penting dalam sektor pertanian perlu diperhatikan taraf kehidupannya seperti kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan petani yang masih rendah mengakibatkan jumlah sumber

daya manusia yang mulai meninggalkan sektor pertanian semakin bertambah tiap tahunnya. Dan mengenai kesejahteraan petani ini, Bapak Suprpto yang seorang petani mengatakan:

“kalo ditanya sejahtera, ya dianggap sejahtera saja mbak. Selain mengurus sawah, dirumah ini juga menerima jahitan, jadi ya masih lumayan. Ada pemasukan juga sedikit-sedikit.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 April 2018)

Berbeda dengan ibu Wiji Rahayu yang pekerjaannya sebagai wanita tanam padi di kelompok tani bumi makmur. Bu wiji mengatakan bahwa:

“ya seorang buruh tanam aja loh mbak, berapa sih penghasilannya. Pasti kan ya rendah, kalo di tanya sejahtera atau tidak ya pasti kurang. Jadi ya ibu-ibu disini itu kalo lagi gak musim tanam ya berjualan sayur-sayuran di pasar. Terus disini kita juga dapat bantuan dari itulo mbak, dari Partai Nasdem. Jadi kita sowan ke kantor DPC nya terus kita cerita-cerita mengenai masalah, ya dari situ itu kita dapat bantuan.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 April 2018)

Selain dari pernyataan kedua narasumber diatas yang bekerja sebagai buruh tani, di bawah ini merupakan hasil wawancara dengan Bapak Khoirudin sebagai salah satu pemilik lahan sawah di Desa Asrikaton. Peneliti bertanya “sebagai petani dan juga pemilik lahan, apakah bapak mengelola lahan sawah ini sendiri atau menyuruh orang pak?”

Kemudian bapak Khoirudin menjawab:

“saya nyuruh orang mbak buat mengelola sawah saya. Jadi setiap waktunya tanam padi, saya nyuruh 1 orang buat mengajak buruh tani lainnya buat garap sawah saya. Biasanya yang nanam padi itu ibu-ibu mbak. Terus kalo waktunya membersihkan rumput-rumput yang ada di sawah itu bapak-bapak, ya saya nyuruh orang itu tadi buat mengajak buruh tani lainnya untuk mengurus sawah saya. Sampe waktunya panen ya orang-orang itu mbak yang mengurus sawah saya. Jadi selama musim tanam hingga musim panen itu saya hanya menyiapkan uang sama makan buat buruh tani. Untuk 1 orang saya bayar 60.000 untuk 1 hari. Kalo untuk

masalah pupuk dan pestisida saya juga yang menyiapkan.”
(wawancara dilaksanakan pada tanggal 25 April 2018)

Selain bertani, bapak Khoirudin juga bekerja sebagai penjual karung

seperti yang dikatakan beliau di bawah ini:

“saya dirumah ini selain bertani juga menjual karung mbak, ya lumayan bisa nambah-nambahi penghasilan setiap bulannya.”
(wawancara dilaksanakan pada tanggal 26 April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber diatas, dapat di simpulkan bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan petani di Kabupaten Malang, strategi yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang adalah dengan mengadakan sosialisai dan juga pelatihan-pelatihan penggunaan teknologi tepat guna kepada petani-petani. Tujuan di adakannya pelatihan ini agar petani dapat menggunakan dan juga memanfaatkan alat mesin pertanian yang telah disalurkan ini dengan baik. Selain itu, fakta di lapangan ditemukan bahwa kesejahteraan di tingkat buruh tani dapat dikatakan kurang, maka dari itu, mereka menjadikan pekerjaan buruh tani sebagai pekerjaan sampingan, dan memilih untuk mencari pekerjaan lain agar cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan bagi para petani pemilik lahan, dapat dikatakan sejahtera karena mereka mampu membayar biaya yang di keluarkan untuk memberi upah kepada buruh tani.

2. Menghadapi Tantangan ke depan seperti:

Seiring dengan perkembangan zaman, strategi-strategi yang telah di laksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang ini di hadapkan oleh beberapa tantangan-tantangan yang dapat menghambat pelaksanaan strategi. Tantangan-tantangan yang mungkin akan di hadapi oleh dinas ke depannya adalah sebagai berikut:

a. Menghadapi luas lahan pertanian yang berkurang

Dewasa ini, keberlanjutan sektor pertanian-tanaman pangan tengah dihadapkan pada ancaman serius, yakni luas lahan pertanian yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif. Kini lahan sawah lebih menguntungkan untuk dijadikan. Konversi lahan sawah sekitar 80 % terjadi di wilayah sentra produksi pangan nasional yaitu Pulau Jawa. Hal ini berdampak pada persoalan ketahanan pangan, mau tidak mau harus didukung oleh lahan yang produktif. Untuk itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) terutama dalam penyediaan peraturan perlindungan bagi lahan pertanian.

Upaya pengendalian terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian tanaman pangan secara efektif dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

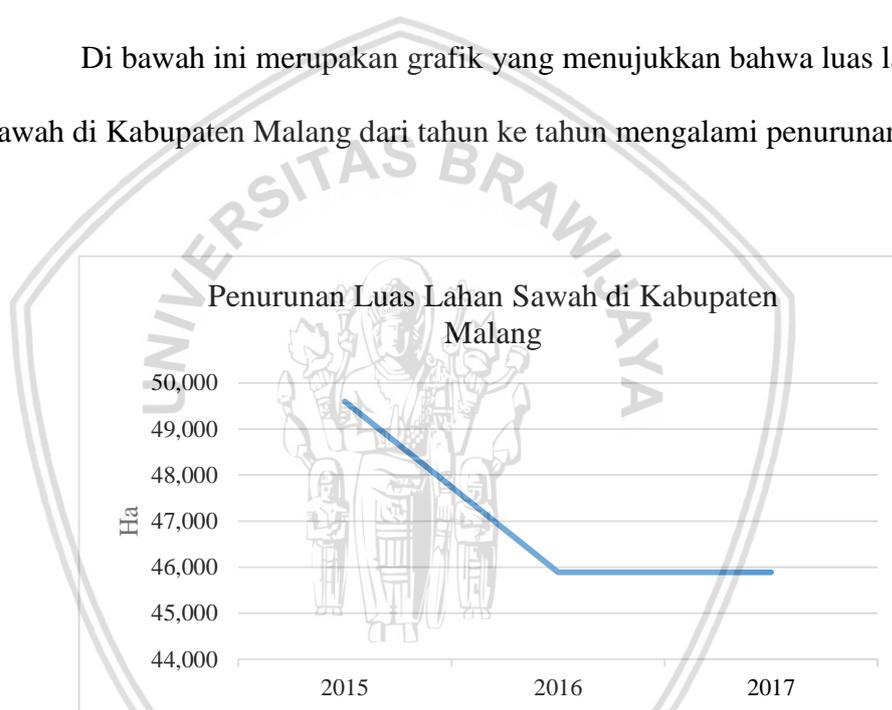
Berkelanjutan (PLP2B) dan Peraturan Pemerintah pendukungnya. Namun pada kenyataannya konversi lahan pertanian ke perumahan dan industri terus berlangsung. Hal ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi keberlanjutan produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan. Oleh karena sistem atau cara perlindungan yang diberikan terhadap petani mulai dari aspek proses produksi sampai aspek pemasaran hasil dan sistem perdagangannya perlu dikembangkan lebih lanjut.

Seiring dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang kemudian di tindak lanjuti oleh Peraturan Daerah No.6 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Malang, maka diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Malang. Tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Daerah ini tertuang dalam Pasal 3 yang isinya adalah sebagai berikut:

- i. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
- ii. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
- iii. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan
- iv. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani
- v. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat

- vi. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani
- vii. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak
- viii. Mempertahankan keseimbangan ekologis
- ix. Mewujudkan revitalisasi pertanian

Di bawah ini merupakan grafik yang menunjukkan bahwa luas lahan sawah di Kabupaten Malang dari tahun ke tahun mengalami penurunan.



Grafik 4.3 Penurunan Luas Lahan Sawah di Kabupaten Malang dari Tahun 2015-2017

sumber: Kabupaten Malang dalam Angka 2015 – 2017

Dalam grafik di atas, di ketahui bahwa mulai tahun 2015 hingga tahun 2017, luas lahan sawah di Kabupaten Malang mengalami penurunan. Penurunan luas lahan sawah di Kabupaten Malang ini disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kegiatan alih fungsi lahan sawah menjadi non-pertanian. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang setiap

tahunnya mengalami kenaikan, maka kebutuhan akan lahan untuk perumahan dan fasilitas lainnya juga akan bertambah.

Alih fungsi lahan pertanian dapat mengancam kondisi pencapaian ketahanan dan keamanan pangan, serta dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan yang sebagian besar kehidupannya masih bergantung pada sektor pertanian. Melihat kondisi tersebut, Bapak Slamet selaku Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, mengatakan:

“untuk mencegah adanya alih fungsi lahan pertanian, diatur dengan adanya regulasi, sekarang ini sudah keluar peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Perdanya nomor 6 tahun 2015. Tetapi memang untuk Peraturan Bupati nya masih dalam proses pembuatan. Menurut saya di dalam Peraturan Daerah tersebut sudah mencakup apa saja yang perlu di perhatikan mengenai alih fungsi lahan pertanian.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2018)

Pernyataan dari Bapak Slamet kemudian di tanggapi oleh Bapak Rony selaku Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, yang mengatakan bahwa:

“Melihat fenomena seperti itu menurut saya, secara pertanian itu adalah ancaman serius. Jadi sebelum keluar Peraturan Bupatinya, izin-izin untuk pengeringan lahan pertanian untuk dialih fungsikan belum ada. Jadi ternyata perumahan itu bukan fasilitas umum, jadi tidak boleh di izinkan untuk membangun.

Berkurangnya lahan pertanian di Kabupaten Malang ini secara resmi sekitar ratusan Ha per tahunnya, itu yg secara resmi. Kalo tidak resmi ya banyak. Sebenarnya gini, seseorang yang memiliki lahan pertanian itu boleh dijual, tetapi harapan kami ya orang yang membeli lahan tersebut lahannya tetap lahan pertanian, bukan dikeringkan kemudian dijadikan bangunan. Sebenarnya hal itu dilarang. Dan rata-rata masyarakat Kabupaten Malang seperti itu. Ya itu memang ancaman yang kalo tetap dibiarkan alih fungsi lahan pertanian ya akan mempengaruhi tingkat nasional.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2018)

Pernyataan dari kedua narasumber diatas selaras dengan yang dikatakan oleh Bapak Suprpto seorang petani mengenai banyaknya pemilik lahan yang menjual sawahnya untuk kepentingan lainnya yang mengatakan:

“ya biasanya lebih milih menjual sawah mbak, daripada bertani tapi tidak mendapatkan keuntungan yang tidak besar. Apalagi kalau harga beras jatuh, sudah jatuhnya banyak, kadang gak balik modal, kalau seperti itu terus kan saya bisa rugi mbak. Belum lagi kalau pas gagal panen. Ya mending saya jual buat modal usaha yang lain.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 April 2018)

Melihat pernyataan dari narasumber diatas, dari Bapak Slamet dan Bapak Rony, Bapak Ajunuddin menambahkan strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang dalam menghadapi salah satu tantangan terbesar yakni penurunan luas lahan pertanian. Beliau mengatakan:

“Strateginya adalah bisa dengan penemuan teknologi baru dan pemanfaatan lahan sekecil mungkin, seperti padi paralon, itu kan bisa ditanami di halaman rumah orang. Dengan 2 petak seperti itu bisa mencukupi 2 orang dalam 1 tahun, dengan panen 4x, katakanlah 3x aja, cepet itu seperti padi itu. Itu bisa menghasilkan sekitar 20 kg 1x panen. Kalau setiap rumah ada seperti itu, paling tidak untuk dia sendiri ya, kalau untuk orang yang menganggur

khususnya ibu-ibu atau anak-anak muda yang tertarik dengan dunia pertanian, saya rasa bisa, tetapi ya itu biayanya cukup besar 7,5 juta untuk 1 petak. Ya jadi harus dibantu.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2018)



Gambar 4.4 Padi Paralon

sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

Salah satu strategi yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang dalam menghadapi banyaknya luas lahan pertanian di Kabupaten Malang yang ber alih fungsi adalah dengan membuat salah satu bentuk inovasi di sektor pertanian yakni padi paralon. Inovasi ini menawarkan berbagai keuntungan, selain dapat digunakan untuk bertani tanpa media, bak penampungan air yang berfungsi untuk mengairi padi yang ada di bawah media ini, dapat menjadi sarana atau media untuk mengembangkan jenis ikan. Salah satu contoh jenis ikan yang dapat di kembangbiakkan adalah ikan lele.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber diatas, dapat di simpulkan bahwa untuk strategi yang

dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang untuk menghadapi ancaman atau tantangan ke depan seperti pengurangan luas lahan sawah di Kabupaten Malang adalah dengan menciptakan inovasi baru dalam sektor pertanian, salah satunya yakni Padi Paralon. Selain diciptakan inovasi baru, pihak dinas berupaya agar peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini dapat ditindaklanjuti sebagai langkah pencegahan terhadap alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Malang.

b. Menghadapi Sumber Daya Manusia yang mulai meninggalkan sektor pertanian

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang dalam melaksanakan strategi untuk mewujudkan swasembada beras di Kabupaten Malang ini dihadapkan oleh tantangan seperti berkurangnya sumber daya manusia yang bekerja di sektor pertanian. Dewasa ini, banyak sumber daya manusia yang mulai meninggalkan sektor pertanian karena nilai pertanian yang tidak stabil dan kurang menjanjikan keuntungan yang besar. Tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi tenaga kerja menurut sektor di Kabupaten Malang pada tahun 2016.

**Tabel 4.2 Klasifikasi Tenaga Kerja Menurut Sektor Tahun 2016 di
Kabupaten Malang**

No	Sektor	Tenaga Kerja		Jumlah	%
		Pria	Wanita		
1.	Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, dan Perburuan	3.139	1.825	4.969	6,01%
2.	Pertambangan dan Penggalian	92	5	97	0,11%
3.	Industri Pengolahan	23.394	32.965	56.359	68,19%
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	694	36	730	0,88%
5.	Bangunan	349	16	365	0,44%
6.	Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan	5.127	2.026	7.153	8,65%
7.	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	783	120	903	1,09%
8.	Keuangan, Asuransi dan Jasa Perusahaan	1.669	724	2.393	2,89%
9.	Jasa Sosial dan Perorangan	7.190	2.491	9.681	11,71%

sumber: Kabupaten Malang dalam Angka, 2017

Berdasarkan dari data tabel di atas di ketahui bahwa jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor industri pengolahan lebih banyak daripada tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian. Angka tenaga kerja di sektor pertanian diatas 5%, setidaknya masih banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian daripada tenaga kerja yang bekerja di sektor lain seperti bangunan. Melihat banyaknya tenaga kerja di sektor

pertanian yang mulai berkurang jumlahnya, tanggapan dari Bapak Slamet adalah sebagai berikut:

“Pertama memang tidak hanya disini saja yang mengalami hal tersebut, kalau misalnya harga pertanian itu stabil, bisa menjanjikan, bertani itu menawarkan keuntungan, kalo bisa untung, saya kira banyak juga yang akan kembali ke desa lagi yang bertani lagi. Memang kan sekarang ini kan harga tidak stabil sehingga tidak mempunyai kepastian keuntungan dari usaha tani nya, istilahnya usaha tani nya tidak bagus lah. Terkait dengan nilai, lahan pertanian itu kan semakin rendah, kalau ditanam jadi rumah, kan lebih mahal harganya, nah kalo tanam padi kan untungnya berapa sih” (wawancara dilaksanakan pada 26 Maret 2018)

Melihat pernyataan dari Bapak Slamet diatas, Bapak Suprpto selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Bumi Makmur beranggapan bahwa:

“Menurut saya itu faktor orang tua seperti saya, secara tradisional seperti tidak punya cita-cita jika anaknya bertani, kayak gak tega. Saya sendiri merasa bertani itu berat, sengsara dan saya mempunyai pikiran anak saya jangan sampai seperti saya, mudah-mudahan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari saya, yang lebih enak, yang lebih layak. Itu faktor orang tua menurut saya.” (wawancara dilaksanakan pada 23 April 2018)

Melihat tanggapan yang diberikan oleh Bapak Suprpto, kemudian peneliti bertanya kepada Bapak Suprpto “Kalau banyak petani yang memiliki pemikiran serupa dengan bapak, lantas bagaimana menurut bapak jika masyarakat yang sebagian besar mengonsumsi beras, kemudian tidak bisa mengonsumsi beras lagi dikarenakan jumlah sumber daya manusianya juga sudah berkurang?”

Pak Suprpto menjawab sebagai berikut:

“Ya itu mungkin sekarang sudah mulai terasa, pemerintah juga mulai merasakan langkanya tenaga kerja untuk petani. Ya saya berharap pemerintah memiliki inovasi yang lebih maju untuk menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin. Kan sekarang sudah ada alat tanam menggunakan mesin, alat memanen menggunakan mesin, bukan hanya perontok tetapi juga pemotong padi juga menggunakan mesin sekarang.” (wawancara dilaksanakan pada 23 April 2018)

Langkanya sumberdaya manusia yang bekerja di sektor pertanian ini juga dirasakan oleh ibu Wiji sebagai ketua Kelompok Wanita Tani, dimana beliau mengatakan:

“sekarang ini kan sulit cari tenaga tanam itu mbak, orang yang tua-tua itu kan sudah sepuh, udah gak kuat lagi, dan disini itu jarang sekali perempuan yang bersedia jadi tenaga tanam.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 April 2018)

Selain dirasakan oleh ibu Wiji, kesulitan mencari sumberdaya manusia yang bekerja di sektor pertanian juga dirasakan oleh bapak Khoirudin sebagai pemilik lahan sawah, yang mana beliau mengatakan:

“wah sekarang ini ya sangat susah mbak cari orang buat ngurus sawah saya, kalo mau saya urus sendiri itu kesusahan mbak. Susahnya gini, misalnya waktunya musim tanam mbak, saya mau nyuruh orang lain, tapi sudah di dahului oleh pemilik lahan lainnya. Kalo gak gitu, pas waktunya saya nyuruh bertani, orangnya gabisa gara-gara kerja. Ya gitu itu mbak susahnyanya.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 25 April 2018)

Melihat tanggapan dari beberapa narasumber diatas, Bapak Ajunuddin memberikan pernyataan:

“Langkah atau strategi yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan contoh atau memberikan *success story* ada orang yang sudah berhasil dalam pertanian disuruh cerita. Atau melakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok *corporate farming* yang saat ini sedang tren di jawa tengah. *corporate*

farming ini cocok bagi generasi muda yang ingin bertani tapi tidak ingin susah-susah, capek sama kepanasan, jadi mereka tidak perlu repot-repot memikirkan benih, memikirkan pupuk, dan sebagainya. Selain itu biasanya kan generasi muda ini memiliki pengetahuan yang lebih maju daripada petani-petani lama, sehingga mereka dapat membuat suatu terobosan atau penciptaan teknologi baru untuk sektor pertanian.” (wawancara dilaksanakan pada 26 Maret 2018)

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa narasumber diatas, di sebutkan bahwa untuk menghadapi jumlah sdm yang meninggalkan sektor pertanian adalah dengan pengalihan tenaga manusia dengan penggunaan teknologi yang lebih canggih, selain itu fakta di lapangan ditemukan bahwa nilai pertanian saat ini tidak stabil, seperti: keuntungan yang diperoleh tidak terlalu besar sehingga hal ini yang menyebabkan para petani memilih untuk meninggalkan sektor pertanian, selain itu, karena sektor pertanian tidak menghasilkan keuntungan yang besar, maka banyak orang yang bekerja di sektor pertanian sebagai pekerjaan sampingan.

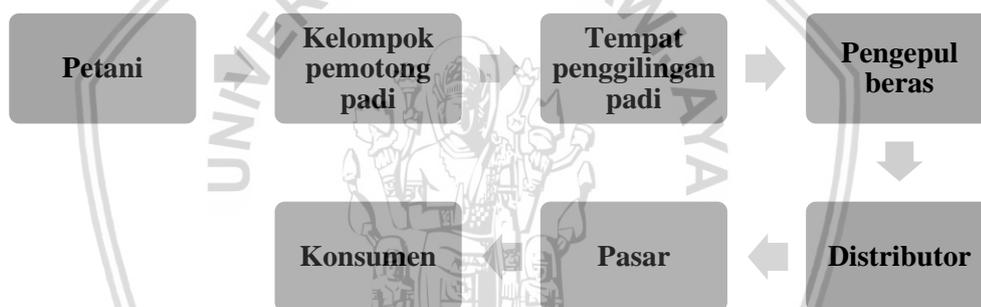
c. Menghadapi alur distribusi beras yang panjang

Distribusi merupakan alur kegiatan ekonomi dimana dengan adanya distribusi ini Aspek yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan swasembada beras adalah aspek distribusi, dimana jika distribusi beras berjalan dengan lancar maka tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan beras per individu, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Malang. Seperti halnya yang dikatakan oleh Kepala

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Bapak

Heri Saputra:

“Selama saya bekerja disini, distribusi pangan khususnya beras ini berjalan dengan aman lancar. Tetapi sayangnya kami Dinas Ketahanan Pangan, tidak memiliki data yang akurat mengenai distribusi beras ini, karena banyak alur yang dilalui untuk beras sampai ke tangan konsumen. Menurut pengamatan saya, setidaknya terdapat 7 alur ataupun aktor yang terlibat dalam pendistribusian beras ini. Alur atau aktor tersebut terdiri dari petani, penebas padi, penggilingan padi, pengepul beras, kemudian konsumen, konsumen ini melalui 2 pasar.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2018)



Bagan 4.1 Contoh Ilustrasi Alur Distribusi Beras di Kabupaten Malang

Sumber: Olahan Peneliti, 2018

Untuk mengurangi banyaknya mata rantai atau alur yang dilalui ini, strategi yang di laksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang adalah dengan melaksanakan beberapa program, program-program tersebut seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Distribusi dan Akses Pangan, Bapak Jusuf sebagai berikut:

“Secara garis besar, tugas pokok dan fungsi dari Seksi Distribusi dan Akses Pangan ini adalah mengurangi mata rantai alur distribusi, bisa 2 atau 3 mata rantai yang dikurangi. Mengurangi mata rantai tersebut dilakukan dengan menggunakan program, baik itu program dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun

Kabupaten. Tetapi program tersebut dampaknya tidak signifikan, dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Malang tidak mencukupi untuk melaksanakan program di setiap Kecamatan. Program pertama dari Pemerintah Pusat yang telah dilaksanakan oleh Dinas adalah LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat), program dimana GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) itu dikasih modal oleh pemerintah nanti harus membeli padi dari petani kemudian dijual ke anggota. Berarti disini ada pengurangan mata rantai. Kemudian program yang kedua, dari Pemerintah Pusat juga namanya PUPM (Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat) atau Toko Tani, itu GAPOKTAN diberi sedikit modal oleh pemerintah, selain untuk mengurangi mata rantai juga menjual beras murah yang kualitasnya premium. Program yang ketiga dari Kabupaten Malang, namanya Kelembagaan Distribusi Pangan, dimana POKTAN atau GAPOKTAN yang ditunjuk itu dikasih 10 bahan pokok kemudian dijual kepada anggota, dan tempat terselenggarakannya di daerah yang jauh dari akses pangan, contohnya daerah Sumbermanjing, Gedangan dan tempat-tempat yang jauh dari akses pangan, yang diharapkan masyarakat di tempat tersebut mudah mengakses pangan yang dibutuhkan.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2018)

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa pelaksanaan dari program-program ini masih terdapat kekurangan, yakni program-program tersebut masih belum bisa berdampak yang signifikan terhadap distribusi beras yang ada di Kabupaten Malang, karena wilayah Kabupaten Malang yang cukup luas sehingga tidak semua kecamatan yang melaksanakan program ini dampaknya akan sama dengan kecamatan yang lain.

Kemudian peneliti bertanya kepada Bapak Jusuf, “Selama ini apa saja yang menjadi kendala Dinas Ketahanan Pangan khususnya Seksi Distribusi dan Akses Pangan dalam mendistribusikan beras, dan bagaimana dinas menangani kendala tersebut?”

Bapak Jusuf menjawab sebagai berikut:

“Kendala distribusi yang pertama adalah alurnya tadi, alur distribusi terlalu panjang, kalau terlalu panjang berarti jumlah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen juga besar. Kedua transportasi, kalau didaerah pegunungan berarti semakin jauh maka semakin mahal. Ketiga topografi, topografi yang landai menjadikan harga tersebut murah, sedangkan topografi yang bergunung itu harga mesti mahal. Untuk memantau distribusi itu terus terang saja sulit, contoh saja beras atau bahan yang masuk atau keluar dari Kabupaten itu sulit dipantau, sama saja dengan di provinsi distribusi itu sangat sulit untuk dipantau. Tetapi bisa dipantau dengan harga, kalau terjadi gejolak harga pada suatu titik, itu pasti kemungkinan stok atau memang cuaca yang tidak mengizinkan.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2018)

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Jusuf dan Bapak Heri di sebutkan bahwa untuk mengurangi alur distribusi beras yang panjang, dapat dilakukan strategi seperti melaksanakan program-program, program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang adalah LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Padi), PUPM (Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat) dan Kelembagaan Distribusi Pangan. Dalam proses distribusi ini, pihak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang mengalami beberapa kendala yang di antaranya: alur yang panjang, transportasi yang susah untuk menjangkau kecamatan di daerah pegunungan dan perbedaan wilayah topografi yang mana semakin kecamatan susah untuk di jangkau, maka harga beras juga semakin tinggi, begitu pula dengan kecamatan yang mudah di jangkau, maka harga beras juga akan rendah. Selain itu, pihak dinas juga merasa kesulitan untuk memantau distribusi beras yang

ada di Kabupaten Malang, tetapi pihak dinas bisa memantau dengan melihat harga beras yang ada di suatu kecamatan.

3. Pengembangan Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam menghadapi tantangan ke depan.

a. Menentukan pengembangan strategi untuk menghadapi tantangan ke depan

Tantangan-tantangan yang muncul sebagai salah satu bentuk perkembangan ini dapat mempengaruhi strategi-strategi yang saat ini sedang di laksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang dalam mencapai swasembada beras. Untuk itu perlu di adakan tindak lanjut dari strategi yang sedang di laksanakan ini, dapat tetap di gunakan ke depannya atau memang perlu di adakan perubahan. Berkaitan dengan strategi yang sedang di laksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang ini peneliti bertanya “apakah perlu di lakukan perubahan atau tidak terhadap strategi yang telah di laksanakan ini pak?”, tanggapan dari Bapak Ajunuddin sebagai Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

“nah, ya itu memang strategi-strategi tersebut harus diperbaharui, paling tidak bagaimana mereka bisa tertarik dengan pertanian.”
(wawancara dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2018)

Kemudian, peneliti bertanya “perubahan strategi seperti apa pak yang akan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang lakukan untuk ke depan nya?”

Bapak Ajunuddin menjawab:

“ya itu tadi penggunaan berbagai teknologi untuk bertani. Ya untuk saat ini kami masih belum bisa menentukan strategi ke depannya, karena kan dalam menentukan strategi yang tepat ini perlu banyak pertimbangan dari segala aspek. Untuk sekarang ya masih melaksanakan strategi yang sudah ada di Rencana Strategi dinas itu” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2018)

Melihat tanggapan dari narasumber di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pihak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang masih belum bisa menentukan strategi ke depan yang akan di ambil untuk tetap mewujudkan swasembada beras di tengah tantangan yang akan terjadi. Dengan demikian, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang untuk saat ini belum ada strategi lain yang di laksanakan untuk menghadapi tantangan ke depan.

C. Analisis Data

1. Strategi Pemerintah Kabupaten Malang dalam Mewujudkan Swasembada Beras

a. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan

Berdasarkan penyajian data di atas, di ketahui bahwa untuk meningkatkan ketersediaan lahan pertanian di Kabupaten Malang merupakan hal yang sulit bahkan dapat dikatakan tidak mungkin untuk

dilakukan. Karena pada faktanya di lapangan, yang terjadi adalah justru lahan pertanian di Kabupaten Malang dari tahun ke tahun mengalami penurunan luas lahan sawah yang sangat besar. Banyaknya kegiatan konversi atau alih fungsi lahan dari lahan basah (sawah) ke lahan kering di Kabupaten Malang ini menjadi salah satu penyebab luas lahan pertanian utamanya lahan sawah mengalami penurunan. Melihat kondisi seperti ini, agar swasembada beras di Kabupaten Malang tetap dapat diwujudkan di tengah-tengah keterbatasan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang melakukan strategi seperti meningkatkan Indeks Pertanaman (IP), dimana dengan meningkatnya IP ini, dapat meningkatkan produktivitas padi walaupun di tengah-tengah luas lahan pertanian yang semakin berkurang.

Dalam hal penyebab berkurangnya unsur hara yang ada di dalam kandungan tanah salah satunya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan pada tanaman. Jika penggunaan bahan-bahan kimia yang berkepanjangan dapat merusak ekosistem lahan pertanian dan tercemarnya air dan tanah di sekitar lahan pertanian (Sulaeman, 2012:20). Rusaknya ekosistem lahan pertanian pernah terjadi di Indonesia pada saat gencar-gencarnya Revolusi Hijau. Saat itu penggunaan pupuk berbahan kimia, obat-obatan pelindung tanaman, dan pestisida berbahan kimia sangat dianjurkan untuk menghasilkan beras yang jumlahnya dapat meningkat hampir 4x lipat (Poerwanto, dkk, 2012:6-9).

Untuk menghindari hal ini terulang kembali, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang saat ini melakukan strategi dengan mengendalikan penggunaan bahan-bahan kimia untuk sektor pertanian. Pengendalian dilakukan dengan menggunakan pupuk berimbang pada lahan sawah yang mana seperti yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian dalam poin ke 6 bagian c yaitu: Mendorong petani untuk menggunakan sistem pemupukan berimbang yang diintegrasikan dengan pupuk organik, dan menerapkan praktek budidaya pertanian yang tepat guna dan ramah lingkungan.

Adapun porsi penggunaan pupuk berimbang yang telah di anjurkan oleh pemerintah, yakni 5:3:2 (500kg pupuk organik, 300kg pupuk kimia dan 200kg pupuk urea). Salah satu desa yang petani-petaniya mengikuti anjuran dari pemerintah untuk menggunakan pupuk berimbang adalah Desa Curungejo Kecamatan Kepanjen, salah satu petani mengakui bahwa mereka telah melaksanakan apa yang dianjurkan pemerintah mengenai penggunaan pupuk berimbang. Saat ini pemerintah mengeluarkan bantuan kepada petani berupa pupuk organik bersubsidi, dengan dikeluarkannya bantuan pupuk organik bersubsidi, dampak yang ditimbulkan tidak hanya dapat membantu petani, tetapi juga dapat meningkatkan kemanfaatan lahan agar tingkat kesuburan lahan dapat terjaga.

b. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian

Berdasarkan penyajian data di atas, komponen utama untuk mendukung kelangsungan produktivitas padi adalah infrastruktur dan sarana pertanian. Dalam rangka peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang melakukan upaya salah satunya adalah pembangunan dan pengawasan terhadap infrastruktur pertanian seperti irigasi. Pengawasan ini dilaksanakan langsung oleh petani sehingga peran petani dalam pengelolaan daerah irigasi dapat berjalan.

Pembangunan dan pengawasan jaringan irigasi air yang telah dilaksanakan oleh dinas ini telah sesuai dengan yang dicantumkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian dalam poin ke 2 bagian iii yakni: Optimalisasi layanan jaringan irigasi melalui operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Pemeliharaan irigasi dilakukan secara langsung oleh para petani, karena petani memegang peran penting dalam sektor pertanian. Kemudian, berkaitan dengan sumber pengairan bagi sawah-sawah di Kabupaten Malang ini berasal dari sungai-sungai yang mengalir di daerah sawah-sawah. Pengawasan terhadap irigasi ini sangat penting karena berkaitan dengan proses pertumbuhan padi, yang jika padi mengalami kekeringan maka akan terjadi gagal panen karena volume air yang kurang.

Sarana pertanian seperti alat mesin pertanian ini merupakan Penggunaan teknologi merupakan salah satu strategi yang dapat

menggantikan tenaga manusia di tengah-tengah tantangan ke depan, yakni berkurangnya sumber daya manusia yang meninggalkan sektor pertanian. disamping dapat menggantikan tenaga manusia, adanya penggunaan teknologi tepat guna dapat membantu meringankan pekerjaan para petani, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengolah lahan sawah lebih efisien. Namun, dalam hal penyediaan alat dan mesin pertanian bagi petani, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang ini mengalami kendala, yaitu persediaan alat mesin pertanian yang disalurkan kepada petani ini jumlahnya sangat terbatas. Alat mesin pertanian yang telah disalurkan kepada kelompok tani pada tahun 2017 sebanyak 643 unit, sedangkan jumlah kelompok tani yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Malang sekitar 864 kelompok (sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, 2017). Untuk penyaluran alat mesin pertanian di Kabupaten Malang ini sendiri, di berikan beberapa tahun sekali. Dari data ini dapat dikatakan bahwa pemberian alat mesin pertanian di Kabupaten Malang oleh pihak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang jauh dari kata cukup, karena belum mampu untuk memenuhi kebutuhan alat mesin pertanian. Kurangnya pemenuhan ini di akibatkan karena banyaknya jumlah kelompok tani yang ada di Kabupaten Malang sehingga penyaluran alat mesin pertanian di Kabupaten Malang mengalami kendala.

c. Penguatan kelembagaan petani

Berdasarkan penyajian data diatas, diketahui bahwa dalam untuk penguatan kelembagaan petani di Kabupaten Malang, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang melakukan berbagai bentuk kegiatan untuk meningkatkan kualitas dari petani-petani di Kabupaten Malang, seperti memberikan pelatihan penggunaan alat mesin pertanian untuk petani pemula. Selain pelatihan penggunaan alat mesin pertanian, dilakukan juga berbagai bentuk bimbingan pemasaran hasil pertanian, di mulai dari memanen sendiri hingga memasarkan hasil pertanian. Bentuk-bentuk pelatihan yang telah dilakukan oleh pihak Dinas dan juga mantri tani ini telah sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian dalam poin 3 bagian 2 yakni: Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis untuk memperkuat kemampuan baik dari segi aspek manajemen kelompok, kegiatan budidaya maupun dalam aspek pengolahan dan pemasaran. Tidak hanya sampai disini, salah satu gabungan kelompok tani yang ada di Kecamatan Kepanjen misalnya, para petani ini dengan inisiatif mereka sendiri mengadakan studi banding ke kecamatan lain agar dapat menambah pengetahuan mereka bagaimana cara mengolah pertanian yang baik dan benar.

Namun, fakta di lapangan ditemukan, bahwa bentuk-bentuk kegiatan seperti sosialisasi dan pelatihan mengenai pemasaran hasil

panen dan meningkatkan pendapatan petani ini masih belum bisa berdampak pada perekonomian para buruh tani. Para buruh tani ini mendapatkan upah per hari yang belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari nya. Maka dari itu, banyak dari para buruh tani ini yang mencari pekerjaan lain selain menjadi buruh tani agar mereka dapat memenuhi kebutuhan setiap hari nya, dari beberapa narasumber di atas banyak dari menjadikan buruh tani sebagai kerjaan sampingan, jika ada yang membutuhkan tenaga mereka, mereka akan bekerja sebagai buruh tani, jika tidak ada yang membutuhkan, mereka akan bekerja yang lain. Kondisi ini sangat memprihatinkan, dimana, disisi lain mereka dapat menghasilkan beras hingga surplus, tetapi hal ini tidak menjanjikan perekonomian dan kesejahteraan mereka akan terangkat. Hal ini tidak sejalan dengan perekonomian mereka. Banyak dari petani yang tingkat pendapatannya masih jauh dibawah. Belum lagi mereka di hadapkan dengan suatu kondisi dimana harga pertanian turun, jika dalam musim panen harga gabah kering saat itu turun dan tidak bisa memberikan keuntungan, para petani ini menjual gabah kering ke kelompok tani setempat. Di dalam Kelompok Tani terdapat program tunda jual, yang mana program ini merupakan program yang kelompok tani tersebut diberi pinjaman oleh pihak Bank sejumlah Rp. 20.000.000,00 untuk membeli gabah kering milik petani saat harga jatuh. Program Tunda Jual ini dapat sedikit membantu para petani disaat harga gabah kering jatuh di pasaran sehingga para petani ini tidak merugi yang berlebihan.

Mengenai hal ini, belum ada tindakan yang nyata atau program kegiatan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang untuk membantu menaikkan taraf kesejahteraan bagi petani dan buruh tani di Kabupaten Malang sebagai SKPD yang menaungi bidang pertanian.

2. Menghadapi tantangan ke depan seperti:

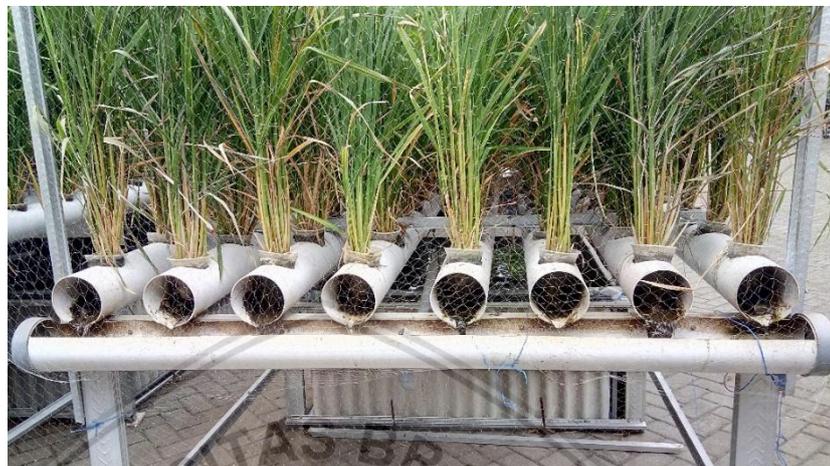
a. Menghadapi luas lahan pertanian yang berkurang

Berdasarkan penyajian data di atas, dalam menjalankan suatu strategi pasti dihadapkan oleh beberapa tantangan yang dapat menghambat strategi tersebut. Tantangan yang di hadapi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang dalam mewujudkan swasembada beras di Kabupaten Malang salah satunya adalah berkurangnya luas lahan pertanian terutama lahan sawah di Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan telah di paparkan dalam penyajian di atas, luas lahan sawah terus menyusut akibat pengalihan fungsi lahan ke non pertanian. Dimana jika hal ini terus terjadi, dapat berdampak pada ketahanan pangan di Kabupaten Malang. Faktor yang menyebabkan pengalihfungsian lahan sawah di Kabupaten Malang, diantaranya adalah petani beranggapan bahwa lahan sawah lebih menguntungkan untuk dikeringkan kemudian dijadikan sebagai perumahan, pabrik, atau infrastruktur untuk aktivitas industri lainnya daripada ditanami tanaman

pangan seperti padi. Selain itu, pengalihfungsian lahan menjadi ke non-pertanian ini didasari karena nilai pertanian yang saat ini masih belum stabil, sehingga para petani lebih memilih untuk menjual lahan mereka daripada tetap mempertahankan untuk sektor pertanian tetapi tidak memberikan keuntungan.

Dari berbagai faktor di atas yang menyebabkan menurunnya lahan sawah di Kabupaten Malang, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai salah satu langkah pencegahan untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian khususnya sawah di Kabupaten Malang. Dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian, dapat melindungi dan mengurangi angka pengalihfungsian lahan sawah di Kabupaten Malang, terutama kecamatan yang berdekatan dengan pusat industri seperti Kecamatan Pakis, Singosari dan Karangploso. Adanya kegiatan pembangunan jalan tol Pandaan-Malang juga menjadi salah satu penyebab berkurangnya lahan sawah di Kabupaten Malang.

Melihat fenomena seperti ini, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Malang melakukan strategi agar sektor pertanian tetap maju disamping keterbatasan lahan pertanian yang tersedia. Salah satunya adalah menciptakan Padi Paralon.



Gambar 4.5 Padi Paralon

sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

Padi paralon ini merupakan sistem bertanam tanpa media, yang mana padi ditanam di dalam tanah yang sedikit dan berair, sehingga padi tetap dapat tumbuh meskipun di tanah yang tidak terlalu luas. Padi Paralon ini diperuntukkan bagi para petani yang tidak memiliki lahan sawah yang cukup seperti di wilayah perkotaan yang sebagian besar lahannya untuk perumahan. Tidak hanya untuk petani yang memiliki lahan terbatas, tetapi Padi Paralon ini juga dapat di peruntukkan bagi generasi muda yang tertarik dengan sektor pertanian yang sebagian dari mereka tidak memiliki lahan sawah. penciptaan padi paralon ini merupakan salah satu inisiatif yang diciptakan oleh dinas dalam menghadapi tantangan ke depan yang tidak dapat dicegah.

b. Menghadapi Sumber Daya Manusia yang meninggalkan sektor pertanian

Berdasarkan penyajian data di atas, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Malang yang kedua adalah berkurangnya sumber daya manusia yang bekerja di sektor pertanian. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini dapat terjadi adalah, nilai pertanian yang masih belum stabil saat ini. Keuntungan dari usaha tani masih belum bisa memberikan kesejahteraan bagi petani-petani khususnya bagi para buruh tani. Dengan kondisi pertanian yang kurang menguntungkan bagi para buruh tani, maka sebagian besar buruh tani lebih memilih untuk bekerja di sektor lain, dan menjadikan buruh tani sebagai pekerjaan sampingan. Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, dapat di lihat bahwa jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan sektor industri pengolahan, karena para tenaga kerja yang bekerja di sektor industri memperoleh upah berdasarkan Upah Minimum Kabupaten setiap bulan nya. Upah Minimum Kabupaten Malang tahun ini sebesar Rp. 2.574.807.22 (sumber:www.gajiumr.com). Jadi upah yang diterima oleh pekerja industri ini lebih jelas jumlahnya daripada para buruh tani yang di upah berdasarkan jenis pekerjaan yang diterima. Selain jumlah upah yang diterima oleh pekerja industri ini besar, waktu bekerja juga di batasi,

selama 8 jam setiap hari. Hal ini yang menyebabkan para buruh tani lebih memilih untuk bekerja di sektor industri.

Jika jumlah sumber daya manusia yang meninggalkan sektor pertanian ini setiap tahun nya bertambah, maka dapat berdampak pada kebutuhan pangan tidak hanya di Kabupaten Malang tetapi juga nasional. Dan nantinya, di khawatirkan Indonesia bergantung dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan beras nasional dengan cara meng impor beras.

Melihat ancaman seperti ini, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang menyusun strategi untuk mengadopsi kerjasama dengan kelompok *Corporate Farming*. *Corporate Farming* ini adalah suatu bentuk kerjasama ekonomi dari sekelompok petani dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi pengelolaan lahan sehamparan dengan tetap menjamin kepemilikan lahan pada masing-masing petani, sehingga efisiensi usaha, standarisasi mutu, dan efektivitas manajemen pemanfaatan sumber daya dapat dicapai (sumber: Dinas Pertanian, 2000). Dengan adanya kerjasama dengan *corporate farming* ini, dapat membantu petani untuk mengelola lahan pertanian dalam pola manajemen yang lebih terstruktur dengan menggunakan teknologi tepat guna, selain itu, dengan adanya kerjasama ini nantinya akan membantu khususnya petani-petani muda untuk mengelola lahan pertanian nya sehingga pertanian mereka memiliki nilai yang tinggi.

c. Alur distribusi beras yang panjang

Berdasarkan penyajian data di atas, di ketahui bahwa alur atau proses distribusi beras yang perlu di lalui terdiri dari 7 mata rantai, hal ini dapat di lihat dari bagan 4.1 di atas, terdapat proses distribusi beras yang diawali dari petani, petani memanen padinya setelah kurang lebih 4 bulan di tanam, kemudian petani ini membutuhkan kelompok pemotong padi untuk memangkas tanaman padi dari tangkainya, setelah di pangkas dan di rontokkan barulah petani ini membawa gabah ke tempat penggilingan padi. Di tempat penggilingan padi, terdapat sebagian petani yang menjual gabahnya, sebagian lagi untuk menggilingkan padi menjadi beras yang kemudian akan di jual ke pengepul beras. Pengepul beras ini terdiri dari pengepul besar dan kecil. Setelah dari pengepul beras, barulah beras yang sudah dikemas ini di distribusikan ke pasar. Para konsumen dapat membeli beras ke pasar dan juga ke distributor beras.

Proses ini yang menjadi dasar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang untuk menyusun strategi agar proses distribusi beras di Kabupaten Malang tidak sepanjang ini dan cepat sampai ke tangan konsumen. Strategi yang selama ini telah dilaksanakan dinas untuk memangkas alur distribusi ini adalah melaksanakan program-program, program-program yang dilaksanakan ini bervariasi. Di antaranya ada

yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber di atas, narasumber mengatakan bahwa program-program yang selama ini telah di jalankan masih belum signifikan dampaknya, karena wilayah Kabupaten Malang yang cukup luas. Luasnya wilayah Kabupaten Malang ini juga berdampak pada harga beras yang terbentuk di setiap kecamatan. Kecamatan yang topografi nya landai dan akses transportasi nya mudah akan memperoleh harga beras yang tidak terlalu tinggi. Berbeda dengan kecamatan yang topografi nya berada di wilayah pegunungan dan akses transportasi nya susah, harga beras yang di dapat akan tinggi karena terpengaruh biaya angkut. Selain itu, kendala yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang ini adalah merasa kesulitan untuk memantau proses distribusi beras di Kabupaten Malang, karena pihak dinas tidak memiliki data terkait beras yang masuk dan keluar Kabupaten Malang. Tetapi, strategi yang di lakukan untuk mengetahui beras yang masuk dan keluar bahkan adanya kelangkaan beras atau tidak dalam suatu daerah, adalah melakukan pemantauan harga beras. Jika dalam suatu daerah terjadi gejolak harga, maka dapat di katakan stok beras yang ada di daerah tersebut jumlahnya mulai berkurang dan belum dapat memenuhi stok, atau di karenakan cuaca yang kurang kondusif untuk produktivitas padi. Sehingga dengan

adanya pemantauan harga beras ini dapat mengetahui ketersediaan beras bagi konsumen ini memenuhi atau tidak.

3. Pengembangan Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam menghadapi tantangan ke depan

a. Menentukan pengembangan strategi untuk menghadapi tantangan ke depan

Berdasarkan jawaban dari narasumber di atas mengenai pembaharuan strategi, menurut peneliti pihak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang masih belum bisa menentukan pengembangan strategi yang akan di capai ke depannya, karena selama ini strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang mulai tahun 2011 hingga saat ini masih tetap sama. Padahal dari tahun ke tahun kondisi di Kabupaten Malang mengalami perkembangan, begitu juga dengan kondisi pertanian, seharusnya perlu adanya pengembangan strategi agar memudahkan dinas untuk menghadapi tantangan yang lebih besar lagi. Kemampuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang untuk melihat tantangan ke depan ini sangat penting dan berpengaruh terhadap strategi yang akan di buat nantinya, sehingga dengan adanya kemampuan melihat tantangan ini dinas dapat tetap mewujudkan swasembada beras di tengah-tengah tantangan yang terjadi di masa

depan. Penentuan arah untuk pelaksanaan strategi ke depan di tentukan dari perubahan kondisi Kabupaten Malang di masa depan, perubahan kondisi Kabupaten Malang yang terjadi setiap tahun nya menjadi tantangan bagi dinas untuk tetap mewujudkan swasembada beras secara berkelanjutan.

Kemudian, terkait dengan strategi-strategi yang telah dilaksanakan selama ini oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang perlu adanya pengembangan, karena masih terdapat kekurangan saat strategi tersebut di implementasikan. Banyak faktor yang menyebabkan sebagian besar strategi yang di laksanakan ini masih terdapat kekurangan, sehingga perlu di lakukan pembaharuan terhadap strategi-strategi lama agar dapat tepat sasaran. Dengan demikian, strategi-strategi yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang perlu adanya pembaharuan seiring dengan berubahnya kondisi di Kabupaten Malang, sehingga ke depan nya di harapkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang mampu menentukan strategi ke depan nya lebih maksimal.

Dari beberapa strategi-strategi di atas, disajikan beberapa alternatif strategi seperti:

1. Membentuk program untuk menstabilkan nilai pertanian.

Nilai pertanian yang sering mengalami naik turun

menyebabkan gejolak di kalangan petani. Saat harga pertanian turun banyak petani yang merasa rugi. Selain itu, dengan tidak stabilnya harga pertanian menyebabkan banyak petani yang meninggalkan sektor pertanian karena merasa tidak mengalami keuntungan yang besar. Dengan adanya program ini, dapat melindungi harga pertanian agar tetap stabil dan tidak jatuh yang dapat mengakibatkan kerugian bagi petani, selain itu dapat mencegah para petani untuk tidak meninggalkan sektor pertanian, karena jika nilai pertanian stabil, maka akan membawa keuntungan dan juga dapat mensejahterakan petani.

2. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan alat mesin pertanian bagi kelompok-kelompok tani di Kabupaten Malang. Alat mesin pertanian merupakan pendukung yang di butuhkan oleh petani untuk mengolah lahan sawah, dimana ketersediaan alat mesin pertanian yang cukup untuk seluruh kelompok tani di Kabupaten Malang dapat mendukung keberhasilan swasembada beras.
3. Menerapkan sistem minapadi. Minapadi merupakan budidaya ikan dan padi dalam satu hamparan sawah. Minapadi dapat meningkatkan produktivitas lahan sawah karena selain tidak mengurangi hasil padi, juga dapat menghasilkan ikan/udang. Usaha ini dapat meningkatkan

pendapatan petani karena dapat mencegah alih fungsi lahan sawah dan juga urbanisasi.

Dengan adanya pemeliharaan ikan di persawahan, selain dapat meningkatkan keragaman hasil pertanian dan pendapatan petani, juga dapat meningkatkan kesuburan tanah dan air, dan mengurangi hama penyakit pada tanaman padi. Keuntungan yang didapat budidaya minapadi ini dapat berupa peningkatan produksi padi dan ikan, mengurangi penggunaan pupuk anorganik dan pestisida, penyiangan dan pengolahan tanah.

4. Membentuk satgas khusus untuk mencegah alih fungsi lahan secara illegal. Banyak kegiatan alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Malang yang dilakukan tanpa izin pihak tertentu, jika kegiatan ini terus menerus terjadi, maka akan berdampak pada berkurangnya luas lahan pertanian di Kabupaten Malang. Satgas ini nantinya akan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lahan sawah dari kegiatan alih fungsi lahan kepada masyarakat dan khususnya bagi petani pemilik lahan.



STRATEGI

- Meningkatkan Indeks Pertanaman
- Meningkatkan Intensifikasi Lahan
- Melakukan pengawasan dan pembangunan jaringan irigasi tersier
- Memberikan bantuan hibah alat mesin pertanian
- Mengadakan sosialisasi dan pelatihan penggunaan teknologi pertanian tepat guna
- Menciptakan inovasi bertanam tanpa media yang luas
- Melakukan kerjasama dengan *Corporate Farming*
- Melaksanakan program pemerintah seperti:
 - LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Padi)
 - PUPM (Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat)
 - Kelembagaan Distribusi Pangan

TANTANGAN

- Luas lahan pertanian berkurang
- Sumber Daya Manusia yang meninggalkan sektor pertanian
- Alur distribusi beras yang panjang

PENGEMBANGAN STRATEGI

Strategi yang telah di laksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang saat ini perlu di lakukan pembaharuan, karena strategi yang di laksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang ini masih terdapat kekurangan dalam implementasinya. Salah satunya adalah mengenai penguatan kelembagaan petani, strategi yang di laksanakan seperti memberikan pelatihan dan juga sosialisasi mengenai manajemen pemasaran hasil pertanian ini masih belum bisa berdampak pada meningkatnya pendapatan petani di Kabupaten Malang. Selain itu, perlunya pembaharuan ini karena selama ini strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang mulai tahun 2011 hingga saat ini masih tetap sama. Padahal, kondisi Kabupaten Malang selalu terjadi perkembangan setiap tahun nya. Pembaharuan mengenai strategi yang dapat di laksanakan ke depan nya oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang dapat di dasarkan dari tantangan yang terjadi di masa depan, sehingga strategi yang terbentuk nantinya dapat menghadapi tantangan

ALTERNATIF STRATEGI

1. Membentuk program untuk menstabilkan nilai pertanian, program ini di bentuk agar menjaga nilai pertanian tetap stabil.
2. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan alat mesin pertanian bagi kelompok tani di Kabupaten Malang
3. Menerapkan budidaya minapadi. Minapadi merupakan budidaya yang selain dapat meningkatkan pendapatan petani, juga dapat meningkatkan produktivitas padi tanpa merusak lingkungan dengan penggunaan zat-zat kimia. Selain itu, dapat mencegah padi dari serangan tikus yang dapat menyebabkan gagal panen.
4. Membentuk satuan tugas khusus untuk mencegah kegiatan alih gungsi lahan secara illegal dengan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lahan sawah kepada masyarakat-masyarakat khususnya petani pemilik lahan. Sosialisasi ini bertujuan agar dapat mengurangi angka penurunan luas lahan sawah di Kabupaten Malang.

Bagan 4.2 Gambaran Pengembangan Strategi

Sumber: Olahan Peneliti, 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat beberapa strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Malang untuk mewujudkan swasembada beras, diantaranya:

1. Strategi Pemerintah Kabupaten Malang dalam Mewujudkan Swasembada Beras

Untuk melakukan beberapa strategi yang saat ini sedang dilaksanakan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, melaksanakan beberapa program kegiatan, seperti:

- a. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan

Dalam meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Malang, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang melakukan strategi dengan cara meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) di tengah-tengah banyaknya kegiatan alih fungsi lahan. Selain itu, untuk menjaga kemanfaatan lahan pertanian khususnya sawah di Kabupaten Malang, dilakukan dengan cara menggunakan pupuk berimbang antara pupuk organik dan anorganik dan juga mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia. Hal ini dilakukan agar kesuburan lahan sawah dapat terjaga.

b. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang dalam meningkatkan infrastruktur dan sarana pertanian adalah dengan melakukan pengawasan terhadap infrastruktur pertanian seperti pengawasan jaringan irigasi pengawasan ini diperlukan agar dapat memastikan bahwa volume air untuk mengairi sawah yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang cukup. Selanjutnya adalah mengenai sarana pertanian, penyaluran bantuan seperti alat mesin pertanian di Kabupaten Malang masih terdapat kendala yakni, jumlah alat mesin pertanian yang di salurkan kepada kelompok tani masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sarana pertanian.

c. Penguatan kelembagaan petani

Strategi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang dalam hal penguatan kelembagaan petani di Kabupaten Malang adalah melaksanakan program kegiatan seperti peningkatan kesejahteraan petani, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada petani-petani pemula mengenai penggunaan dan pemanfaatan teknologi pertanian dimulai dari pra-tanam hingga pasca-panen yang secara rutin dilakukan oleh penyuluh

pertanian dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang. Tetapi, pengadaan sosialisasi dan penyuluhan ini masih belum bisa berdampak pada tingkat kesejahteraan para buruh tani. Dimana penghasilan yang mereka peroleh dari bertani masih kurang untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga mereka mencari pekerjaan lain untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari.

2. Menghadapi tantangan ke depan

a. Menghadapi luas lahan pertanian yang berkurang

Salah satu faktor yang menyebabkan sering terjadinya kegiatan alih fungsi lahan di Kabupaten Malang adalah banyak dari petani pemilik lahan yang merasa bahwa sawah mereka tidak banyak menghasilkan keuntungan, mereka lebih memilih menjual sawah mereka karena jika mereka menjual sawah, akan memberikan penghasilan yang lebih.

Melihat kondisi ini, strategi yang dilakukan oleh pihak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang adalah dengan menciptakan inovasi baru yakni Padi Paralon. Sebuah inovasi bertanam tanpa media, Padi Paralon ini dapat di tujukan bagi para petani pemula atau generasi muda yang ingin memulai usaha pertanian, tetapi tidak memiliki lahan yang cukup. Dengan adanya Padi Paralon ini di harapkan

dapat menanggulangi tantangan yang akan terjadi di Kabupaten Malang di masa yang akan datang. Selain itu, penegakkan terhadap Peraturan Daerah mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini perlu di perhatikan pelaksanaannya agar lahan pertanian di Kabupaten Malang tidak berkurang dan tetap terjaga.

b. Menghadapi Sumber Daya Manusia yang mulai meninggalkan sektor pertanian

Banyaknya Sumber Daya Manusia yang meninggalkan sektor pertanian juga menjadi salah satu tantangan bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang. Jumlah pendapatan yang diterima oleh petani yang tidak seberapa, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak buruh tani yang bekerja di sektor lain, dan menjadikan buruh tani sebagai pekerjaan sampingan. Melihat kondisi seperti ini, strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Malang adalah dengan melakukan kerjasama dengan *Corporate Farming*. *Corporate farming* ini dapat menjadi salah satu alternatif bagi para generasi muda yang tertarik dengan sektor pertanian dengan teknik bertani yang lebih modern.

c. Menghadapi alur distribusi beras yang terlalu panjang

Panjangnya alur distribusi yang harus dilalui untuk sampai ke tangan konsumen, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang melakukan strategi dengan melaksanakan beberapa program, diantaranya adalah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), dan Kelembagaan Distribusi Pangan, tetapi dalam proses pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala yakni program-program tersebut belum memiliki dampak yang signifikan terhadap kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Perbedaan harga beras yang terjadi di setiap kecamatan dipengaruhi oleh topografi wilayah, yang mana semakin jauh suatu kecamatan, maka biaya angkut yang dikeluarkan juga semakin tinggi. Begitu pun dengan kecamatan yang terletak di daerah yang mudah di akses, harga beras yang di peroleh akan berbeda dengan kecamatan yang terletak di wilayah pegunungan. Pemantauan keluar masuknya beras di Kabupaten Malang ini dapat di lakukan dengan memantau harga beras di pasaran, jika suatu kecamatan terjadi gejolak harga, maka dapat di katakan stok beras di kecamatan tersebut mulai berkurang.

3. Pengembangan Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam menghadapi tantangan ke depan

- a. Menentukan pengembangan strategi untuk menghadapi tantangan ke depan

Strategi-strategi yang selama ini di laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang perlu adanya langkah pembaharuan, karena sebagian besar dari strategi tersebut dalam implementasinya masih terdapat kekurangan. Selain itu, perlunya pembaharuan ini karena selama ini strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang mulai tahun 2011 hingga saat ini masih tetap sama. Padahal, kondisi Kabupaten Malang selalu terjadi perkembangan setiap tahun nya. Pembaharuan mengenai strategi yang dapat di laksanakan ke depan nya oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang dapat di dasarkan dari tantangan yang terjadi di masa depan, sehingga strategi yang terbentuk nantinya dapat menghadapi tantangan tersebut dengan baik.

B. Saran

1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang untuk ke depannya bisa membuat program yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani, sehingga dengan adanya program ini di

harapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Malang, jika petani merasa sektor pertanian ini memberikan keuntungan bagi mereka, maka dengan sendirinya petani akan terus bekerja di sektor pertanian dan angka penurunan petani dapat berkurang.

2. Perlu adanya sinergitas antara Universitas, Pemerintah dan Swasta untuk melakukan kerjasama dalam mengembangkan pertanian yang lebih maju. Pihak universitas melakukan penelitian, pihak Pemerintah dan Swasta mendukung dari segi pembiayaan.
3. Petani-petani muda bersama penyuluh dan juga manteri tani dapat bekerjasama menciptakan inovasi baru di sektor pertanian, sehingga dengan adanya penciptaan inovasi baru dapat menarik para generasi muda untuk terjun ke dalam dunia pertanian.
4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang sebagai Dinas yang menaungi bidang pertanian di Kabupaten Malang dapat mengadopsi teknik-teknik bertani secara modern dari negara-negara maju sehingga bertani saat ini tidak bergantung pada musim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta
- David, Fred R. 2002. *Manajemen Strategis Konsep, Edisi Ketujuh, Pearson Education Asia*. Jakarta: PT. Prenhalindo.
- Dinas Pertanian. 2000. *Panduan Rice Estate and Corporate Farming*. Bandung.
- Domai, Tjahjanulin. 2011. *Desentralisasi*. Malang: UB Press
- Firdaus, Lukman M. Baga, dan Purdiyanti Pratiwi. 2008. *Swasembada Beras dari Masa ke Masa*. Bogor: IPB Press
- Glueck, W.F., dan Jauch, L. R. 1991. *Strategy Management and Business Policy*. New York: McGraw-Hill
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Muhammad, Suwarsono. 2013. *Strategi Pemerintahan Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Muluk, Khairul. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- _____. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Osborne, David dan Ted Gaebler. 2008. *Mewirusahaakan Birokrasi (Reinventing Government)*. Jakarta: Teruna Gravika
- Pemikiran Guru Besar IPB. 2012. *Merevolusi Revolusi Hijau*. Bogor: IPB Press
- Salusu, J. 2004. *Pengambilan Keputusan Strategik*. Jakarta: Grasindo
- _____. J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo Gramedia Widia Sarana Indonesia.

- Suhud, Yuanita. 2009. *Solusi Pangan Indonesia*. Jakarta: Solusi Bangsa Center
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik (edisi revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syafrie, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Yuwono, Tribuwono, dkk. 2011. *Pembangunan Pertanian: Membangun Kedaulatan Pangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Skripsi:

- Rahayu. 2016. *Analisis Pencapaian Program Swasembada Beras pada Tahun 2017 di Indonesia*. Institut Pertanian Bogor

Dokumen:

Kabupaten Malang dalam Angka 2015

Kabupaten Malang dalam Angka 2016

Kabupaten Malang dalam Angka 2017

Pedoman Umum Subsidi Rastra

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Malang

Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 2017 – 2019

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang 2016 – 2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2016 – 2021

Internet:

www.madiunpos.com. Diakses 16 Januari 2018

www.surabaya.tribunews.com. Diakses 16 Januari 2018

Bawono, Ick Ranga. 2010. *Manajemen Srategik Sektor Publik: Langkah Tepat Menuju Good Governance*. Online, <http://blog.umy.ac.id/ghea/files/2011/12/STRATEGIK-SEKTOR-PUBLIK-LANGKAH-TEPAT-MENUJU-GOOD-GOVERNANCE.pdf>. Diakses pada tanggal 15 April 2018

Agus. 2018. *Daftar gaji UMR Jatim Tahun 2018*. Online, <http://www.gajiumr.com/gaji-umr-jawa-timur/>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2018

Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Malang

1. Sejak kapan program swasembada beras ini dicanangkan di Kabupaten Malang?
2. Sejak program swasembada beras ini dicanangkan, angka perolehan tertinggi di tahun berapa?
3. Dalam menerapkan strategi tersebut, apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang ini?
4. Bagaimana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang menghadapi hambatan tersebut?
5. Dengan melihat tantangan ke depan, bagaimana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang menyikapi tantangan ke depan seperti adanya penurunan jumlah lahan pertanian yang dialihfungsikan untuk pembangunan kawasan perumahan dan penurunan jumlah SDM yang bekerja di sektor pertanian?
6. Apakah dengan strategi yang saat ini Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang terapkan ini cukup, atau adakah yang perlu diperbaharui dari strategi sebelumnya?
7. Jika ada pembaharuan strategi, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pembaharuan strategi tersebut?
8. Bagaimana usaha Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang agar program swasembada beras ini dapat berkelanjutan di Kabupaten Malang?
9. Bagaimana sistem irigasi pada lahan persawahan di Kabupaten Malang?
10. Bagaimana usaha dinas dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas petani?

Pedoman wawancara kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang

1. Bagaimana sistem distribusi beras di kabupaten malang saat ini?
2. Apakah selama ini terdapat kendala-kendala dalam mendistribusikan beras?
3. Bagaimana cara dinas memantau distribusi beras?
4. Siapa saja aktor yang berperan dalam proses distribusi?
5. Apakah selama ini distribusi beras selalu lancar?







LUAS LAHAN SAWAH BUKAN SAWAH DAN BUKAN PERTANIAN (hektar)

Propinsi : 35 JAWA TIMUR
Kab/Kota : 07 MALANG
Tahun : 2017

No.	Kecamatan	Lahan Sawah					Lahan bukan sawah										TOTAL LAHAN			
		Irigasi	Tadah Hujan	Pasang Surut	Lebak	Sawah	Jumlah Lahan Sawah	Tegal/ Kebun	Ladang/ Huma	Perkebunan	Rakyat	Ditanami Pohon/ Hutan	Rumpun	Pengembalaan	Negara	Hutan		Sementara Tidak Disusahakan	Lainnya (kolam, empang, dll)	Jumlah Lahan Sawah
1	DONOMULYO	2.017	-	-	-	2.017	8.192	3.000	-	-	2.497	-	-	3.151	-	-	10	10.699	5.227	17.943
2	KALIPARE	1.887	1.020	-	-	2.907	2.631	1.156	3.478	50	567	-	1.079	-	-	0	7.244	1.235	14.581	
3	PAGAK	470	60	-	-	530	1.156	1.481	-	-	-	-	-	-	-	0	2.593	1.075	9.009	
4	BANTUR	995	258	-	-	1.253	7.980	-	58	3.464	-	-	-	-	-	45	10.908	1.215	13.236	
5	GEDANGAN	0	761	-	-	761	5.277	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.383	921	16.065	
6	SUMBERMANING	615	234	-	-	849	5.214	2.588	3.255	30	-	-	1.384	-	-	4	12.472	8.656	22.177	
7	DAMPIT	1.299	-	-	-	1.299	4.515	-	4.200	-	-	-	346	-	-	0	9.065	3.418	13.782	
8	TIRTO YUDO	408	91	-	-	499	3.471	-	1.915	-	-	-	2.581	-	-	0	7.967	9.330	18.396	
9	AMPELGADING	316	91	-	-	407	6.578	-	2.487	254	-	-	206	-	-	258	14.998	588	15.993	
10	PONCOKSUKIJO	1.352	116	-	-	1.468	11.793	-	-	-	-	-	7.271	-	-	0	13.849	4.372	19.689	
11	WALAK	1.301	-	-	-	1.301	4.599	-	-	54	-	-	-	-	-	1.151	6.950	1.204	9.455	
12	TUREN	2.248	-	-	-	2.248	1.749	-	-	-	-	-	-	-	-	329	2.132	2.014	6.394	
13	BULULAWANG	1.677	-	-	-	1.677	1.778	500	-	85	-	-	-	-	-	0	2.363	783	4.823	
14	GONDANGLEGI	2.969	-	-	-	2.969	1.294	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.296	1.947	6.212	
15	PAGELARAN	2.650	-	-	-	2.650	1.203	-	-	-	-	-	-	-	-	23	1.048	4.924	4.098	
16	KEPAJEN	2.152	-	-	-	2.152	1.164	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1.179	767	3.729	
17	SUMBERPUCUNG	1.692	-	-	-	1.692	467	-	-	-	-	-	5	-	-	10	1.002	563	3.179	
18	KROMENGAN	1.522	-	-	-	1.522	1.788	-	346	-	-	-	707	-	-	16	4.917	2.11	7.911	
19	NGALUM	1.692	-	-	-	1.692	3.178	-	1.022	-	-	-	-	-	-	10	4.917	1.302	7.911	
20	WONGSARI	920	-	-	-	920	1.378	124	920	920	256	-	50	-	-	4	3.396	1.653	5.969	
21	WAGIR	1.127	-	-	-	1.127	2.112	1.239	469	256	-	-	-	-	-	1	4.077	2.569	7.773	
22	PAKSALI	1.473	-	-	-	1.473	686	67	22	142	-	-	-	-	-	689	1.586	809	3.868	
23	TAJINAN	1.731	-	-	-	1.731	1.300	930	-	-	-	-	-	-	-	0	2.230	51	4.012	
24	TUMPANG	1.324	-	-	-	1.324	2.709	1.170	296	-	-	-	-	-	-	220	4.394	1.311	7.029	
25	PAKIS	1.713	-	-	-	1.713	1.885	-	1.451	-	-	-	-	-	-	0	3.336	213	5.262	
26	JABUNG	1.192	33	-	-	1.225	8.431	-	1.032	995	-	-	-	-	-	300	12.263	121	13.609	
27	LAWANG	640	-	-	-	640	3.079	-	-	600	-	-	-	-	-	0	4.074	1.292	6.006	
28	SINGOSARI	1.322	-	-	-	1.322	3.682	-	250	-	-	-	-	-	-	210	4.742	4.511	10.575	
29	KARANGPLOS	1.133	-	-	-	1.133	1.970	-	41	-	-	-	-	-	-	1	2.012	2.785	6.152	
30	DAU	428	20	-	-	448	2.250	-	307	42	-	-	4	-	-	0	3.122	2.982	6.152	
31	PULON	865	420	-	-	1.285	2.284	-	70	193	-	-	-	-	-	0	2.547	13.057	13.589	
32	NGANTANG	936	45	-	-	981	2.380	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3.680	8.326	13.589	
33	KASEMBON	673	-	-	-	673	2.325	-	13	-	-	-	-	-	-	0	2.338	2.351	5.962	
JUMLAH		42.739	3.149	-	-	45.888	110.167	11.099	24.142	13.849	-	-	22.381	-	-	1.303	7.390	190.351	84.435	320.674

**PERKEMBANGAN LUAS PANEN DAN PRODUKSI PERTANIAN
KABUPATEN MALANG**

a. Perkembangan Luas Tanam Pertanian (Ha)

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Padi	68.558	62.277	68.594	68.248	70.289	74.443	71.172
2	Jagung	61.150	50.989	56.043	52.596	48.445	57.913	46.972
3	Ubi kayu	15.432	14.246	15.741	11.219	9.421	12.160	6.987
4	Ubi Jalar	1.243	1.253	1.187	944	589	712	878
5	Kedelai	545	115	503	331	290	602	68
6	Kacang Tanah	2.640	1.839	2.013	1.482	1.167	1.352	771
7	Kacang Hijau	11	-	-	8	19	14	29

b. Perkembangan Produksi Pertanian (Ton)

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Padi	445.033	400.235	461.291	461.306	478.930	505.138	493.793
2	Jagung	297.306	245.570	297.667	271.113	247.150	295.340	289.192
3	Ubi kayu	450.751	396.680	367.228	366.368	248.529	250.453	266.181
4	Ubi Jalar	11.576	11.491	101.617	21.143	7.880	7.639	11.165
5	Kedelai	677	143	653	490	359	964	117
6	Kacang Tanah	3.549	2.452	4.071	3.415	1.746	2.013	1.832
7	Kacang Hijau	10	-	-	4	20	11	25
	Kenakan produksi padi %	(1,25)	(10,07)	15,26	0,003	3,82	5,47	(2,25)
	Palawija	763.868	656.335	771.236	662.533	505.684	556.420	568.511
	Pangan	1.208.901	1.056.570	1.232.527	1.123.835	984.594	1.061.547	1.062.279
	Pangan %	(7,35)	(12,60)	16,65	(8,82)	(12,39)	7,82	0,07
	Palawija %	(10,57)	(14,08)	17,51	(14,09)	(23,67)	10,03	2,17

b. Perkembangan Luas Panen Pertanian (Ha)

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Padi	66.617	59.912	65.663	65.126	67.636	71.337	70.181
2	Jagung	59.110	48.824	56.136	49.192	45.232	54.052	44.933
3	Ubi kayu	15.931	14.020	12.984	12.954	9.608	9.682	10.286
4	Ubi Jalar	1.221	1.212	5.631	1.172	647	628	917
5	Kedelai	545	115	547	411	223	599	70
6	Kacang Tanah	2.640	1.824	1.793	1.504	1.172	1.352	807
7	Kacang Hijau	11	-	-	4	23	13	29

c. Perkembangan Produktivitas Pertanian (Ku/Ha)

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Padi	66,80	66,80	69,55	70,81	70,81	70,81	70,36
2	Jagung	50,30	50,30	55,87	54,64	54,64	54,64	64,36
3	Ubi kayu	282,94	282,94	282,83	282,83	258,78	258,78	258,78
4	Ubi Jalar	94,82	94,82	180,47	180,47	121,71	121,71	121,71
5	Kedelai	12,42	12,42	11,94	11,94	16,09	16,78	16,78
6	Kacang Tanah	13,44	13,44	22,71	22,71	14,89	22,71	22,71
7	Kacang Hijau	9,00	9,00	0,00	8,75	8,75	8,75	8,75
						554,18	563,45	

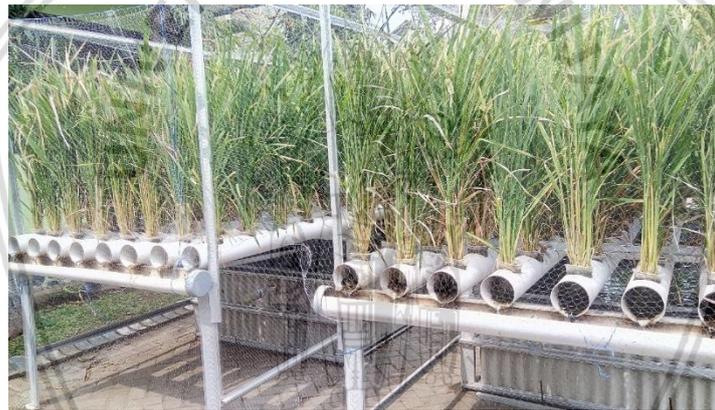
d. Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan (Beras) Kabupaten Malang

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.446.544	2.470.741	2.470.741	2.508.698	2.527.127	2.560.675	2.576.596
2	Kebutuhan Pangan Rul (Tg)	222.780	168.737	206.235	228.440	230.110	233.165	234.615
3	Ketersediaan Pangan (Ton)	287.586	207.322	263.633	273.377	301.822	319.247	309.806
	Surplus/Minus (Ton)	64.806	38.585	57.399	44.937	71.712	86.082	75.191

PADI KE BERAS		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	PANEN HA	66.617	59.912	65.663	65.126	67.636	71.337	70.181
	PROVITAS KUHA	66,80	66,80	69,55	70,81	70,81	70,81	70,36
	PRODUKSI TON	445.033	400.235	456.688	461.157	478.930	505.138	493.793
	LOSIS	31.152	28.016	31.968	32.281	33.525	35.360	34.566
	SISA PRODUKSI	413.881	372.218	424.720	428.876	445.405	469.778	459.228
	EQ BERAS TON	279.369	251.247	286.686	289.491	300.649	317.100	309.879



Bentuk Padi Paralon dari jauh



Bentuk Padi Paralon dari dekat



Wawancara dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang



Wawancara dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang



Bersama dengan ibu Wiji Rahayu Sekretaris Gapoktan Bumi Makmur sekaligus Ketua Kelompok Wanita Tani desa Curungejo, Kepanjen.



Petani desa Genengan Pakisaji sedang menyemai bibit padi



Kegiatan pertanian di desa Genengan Pakisaji